



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT

DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA

DAN PETERNAKAN

Alamat : Komp. Perkantoran Gubernur Provinsi Sulawesi Barat,
Jl. H.A. Abdul.Malik Pattana Endeng, Rangas – Mamuju KP 91512, Telp./Fax 0426 – 2321811

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI BARAT

NOMOR :

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA (RENJA)

DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN PROVINSI

SULAWESI BARAT

TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN

PROVINSI SULAWESI BARAT

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangkamenengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah.
- b. Bahwa berdasarkan Ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu diterbitkan Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat tentang Penetapan Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 484/KPTS/RC. 020/M/8/2021 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 259/KPTS/RC.020/M/05/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024.
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Nomor 2);
12. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.
13. Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Rencana Kerja (RENJA) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2024.
- KESATU : Rencana Kerja (RENJA) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Kerja (RENJA) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2024 disusun dengan berpedoman pada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Barat 2005-2025, Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian Pertanian
-

Republik Indonesia Tahun 2020-2024, Dokumen RENSTRA DTPHP Tahun 2023 - 2026 dan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024.

- KETIGA : Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Poin KESATU berkedudukan dan berfungsi sebagai dokumen perencanaan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) - SKPD setelah memperhatikan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan pembangunan yang ditetapkan.
- KEEMPAT : Sistematika Rencana Kerja (RENJA) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2024, meliputi :
- Bab I : Pendahuluan
 - Bab II : Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Tahun 2022.
 - Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2024.
 - Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2024.
 - Bab V : Penutup
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mamuju
Pada tanggal : Juli 2023

KEPALA DINAS

Muhtar, SP

Pangkat : Pembina Utama Muda/ IV.c
Nip. 19641231 19871 1 036

Tembusan :

1. Gubernur Sulawesi Barat (sebagai laporan) di Mamuju
 2. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju
 3. Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju
 4. Kepala Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju
 5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju
 6. Arsip
-

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidayah- Nya serta sholawat dan taslim kepada Rasulullah SAW, sehingga Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024 ini dapat diselesaikan. Renja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat dimaksudkan sebagai pedoman dalam merencanakan dan merumuskan program dan kegiatan pembangunan Pertanian periode 2023-2026.

Renja Dinas TPHP memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang menjabarkan isu-isu permasalahan strategis pembangunan daerah yang menjadi kewenangan atas tugas pokok dan fungsi Dinas serta program-program strategis yang akan dilaksanakan untuk Tahun 2024. Renja Dinas TPHP merupakan tolok ukur target pencapaian kinerja yang jelas melalui sumber pembiayaan APBD dan dukungan APBN, sehingga diharapkan mampu memberikan kontribusi akseleratif pada proses pembangunan di Provinsi Sulawesi Barat melalui penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Proses penyusunan Renja ini tidak terlepas dari keterlibatan dan peran aktif dari semua pihak. Oleh karena itu kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu atas terselesainya penyusunan Renja ini.

Akhir kata semoga dokumen ini dapat bermanfaat bagi kita semua demi kemajuan dan perkembangan pembangunan Pertanian terutama dalam mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat yakni Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Daerah dan meningkatkan pembangunan manusia yang unggul dan berbudaya.

Kepala Dinas

Muhtar, SP

Pangkat: Pembina Utama Muda/IV.c

NIP : 19641231 198711 1 036

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Garut sebagai Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Garut menyusun dokumen Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat.

Dokumen perencanaan jangka panjang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) daerah, jangka menengah dituangkan dalam rencana Menengah (RPJM) daerah atau Rencana Pembangunan Daerah (RPD), perencanaan pembangunan tahunan dituangkan dalam rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan perencanaan pembangunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tahunan dituangkan dalam Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah. Rencana Kerja (RENJA) yang merupakan bagian dari Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas TPHP Tahun 2023-2026, memuat kebijakan publik dan arah kebijakan pembangunan Pertanian selama setahun, yang diharapkan dapat menciptakan kepastian kebijakan sebagai komitmen OPD yang harus dilaksanakan secara konsisten.

Penetapan Undang Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Hasil turunan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 Undang Undang Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Rencana Kerja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Pada Tahun 2024, Tema Pembangunan RKPD adalah “Peningkatan Ekonomi Inklusif dan Daya Saing Sumberdaya Manusia”

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

- a. Renja OPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari tujuan, sasaran dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
- b. Renja merupakan acuan Perangkat Daerah untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2024
- c. Renja OPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatat dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah/Perangkat Daerah pada tahun 2024

Mengingat arti strategis dokumen Rencana Kerja dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat dalam proses penyusunan Renja Tahun 2024 berpedoman pada Renstra DTPHP Tahun 2023 - 2026, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

Pembangunan pertanian ke depan juga menghadapi banyak tantangan yang tidak mudah, antara lain bagaimana meningkatkan produktivitas dan nilai tambah produk dengan sistem pertanian yang ramah lingkungan, membudayakan penggunaan pupuk kimiawi dan organik secara berimbang untuk memperbaiki dan meningkatkan kesuburan tanah, memperbaiki dan membangun infrastruktur lahan dan air serta perbenihan dan perbibitan, membuka akses pembiayaan pertanian dengan suku bunga rendah bagi petani/peternak kecil, memperbaiki citra petani dan pertanian agar kembali diminati generasi penerus, memperkuat kelembagaan usaha ekonomi produktif di perdesaan, memenuhi kebutuhan pangan, mengembangkan komoditas unggulan tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perkebunan serta meningkatkan sumber daya manusia pertanian.

Sejalan dengan Visi pembangunan Provinsi Sulawesi Barat yang tertuang dalam RPJPD 2005-2025 yaitu Terwujudnya Sulawesi Barat yang sejahtera, Maju dan Malaqbi. utamanya pada misi pertama yaitu "*Mendorong pemenuhan hak-hak dasar melalui pertumbuhan ekonomi, perluasan lapangan kerja, dan peningkatan akses penduduk terhadap sumber daya*", dan memperhatikan Visi Pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 yang dituangkan dalam 7 Agenda pembangunan terutama pada Agenda Pertama "*Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas*", maka strategi pembangunan yang telah dibahas sebelumnya dapat dituangkan dalam beberapa Program pembangunan pertanian di provinsi Sulawesi Barat yang dapat dioperasionalkan dalam penganggaran Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 4. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 8. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
-

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
12. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015- 2019;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 05 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005 – 2025;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Povinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 79) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 95);
15. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022 Nomor 4)
16. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024.

I.3. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024 dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil/aparat dinas dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Peternakan dan Kesehatan Hewan, Prasarana dan Sarana Pertanian, Penyuluhan, dan Sekretariat Dinas serta UPTD sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan di tahun 2024 dapat tercapai.
 2. Mempermudah kontrol, koordinasi, analisa, monitoring dan evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal;
 3. Memberikan informasi kepada pemangku-pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana pembangunan di sektor pertanian;
 4. Menjadikan kerangka dasar bagi Pemerintah Daerah pada umumnya dan
-

Dinas khususnya dalam upaya peningkatan kualitas pembangunan di bidang Pertanian;

5. Mewujudkan sinkronisasi pembangunan di daerah khususnya antara target kinerja dalam RPD Provinsi Sulawesi Barat dengan Renstra Dinas Provinsi Sulawesi Barat untuk tahun berjalan;

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024 dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Acuan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan dalam mengoperasionalkan RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi & misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
2. Sebagai dasar dalam perumusan Program dan Kegiatan pembangunan pertanian tahun 2024
3. Acuan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Pertenakan Provinsi Sulawesi Barat terhadap target pencapaian yang akan Telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat 2023- 2026.

I.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024 menggambarkan sejumlah target kinerja kegiatan/ program yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Sistematika penulisan Rencana Kerja- Satuan Kerja Perangkat Daerah (Rencana Kerja -SKPD) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2022

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun 2022 dan capaian Renstra
 - 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
 - 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
 - 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
 - 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.
-

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

- 3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja SKPD
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

- 4.1 Program dan Kegiatan Prioritas
- 4.2 Program dan Kegiatan SKPD

BAB V PENUTUP



BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2022

II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Capaian Renstra SKPD

Evaluasi Rencana Kerja (RENJA SKPD) adalah bagian dari proses pengukuran keberhasilan dari suatu SKPD. Pada tahap ini beberapa kebijakan dalam bentuk program dan kegiatan yang tidak tercapai dapat dievaluasi sehingga SKPD dapat menentukan kebijakan baru dalam mengatasi permasalahan tersebut.

Penyerapan anggaran belanja langsung APBD Perubahan Tahun 2022 sebesar 95,36 % dari total anggaran Rp. **45.323.242.065,00** yang dialokasikan. Pagu dan realisasi anggaran dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel II.1 Laporan Kemajuan Kegiatan Tahun Anggaran 2022

Program/Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi		
	Tahun 2022	Fisik (%)	Keuangan	
			Rp	%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	586.912.591		575.484.622	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	335.635.737	100 %	324.621.717	97 %
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	13.547.000	100%	13.362.885	99%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10.683.000	100%	10.670.916	100%
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	6.737.800	100%	6.733.992	100%
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	6.497.800	100%	6.449.532	99%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11.237.251	100%	11.225.643	100%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	202.574.003	100%	202.419.937	100%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.148.095.344		14.951.727.424	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.022.662.084	100%	14.826.544.377	99%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	24.365.000	100%	24.358.623	100%
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	38.181.480	100%	38.025.951	100%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	44.746.340	100%	44.706.186	100%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	11.535.320	100%	11.531.551	100%
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	6.605.120	100%	6.560.736	99%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	936.566.641		927.669.112	

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.397.000	100%	6.302.732	99%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	294.454.968	100%	291.349.026	99%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	144.160.000	100%	144.140.800	100%
Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	35.897.864	100%	35.888.239	100%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	800.000	100%	799.200	100%
Penyediaan Bahan/Material	50.002.289	100%	49.862.532	100%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	404.854.520	100%	399.326.583	99%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	616.811.355		593.916.083	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	141.665.320	100%	133.821.466	94%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	259.970.785	100%	252.576.368	97%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	215.175.250	100%	207.518.249	96%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	982.232.020		952.683.301	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	279.600.000	100%	268.072.700	96%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	647.079.240	100%	629.083.240	97%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	55.552.780	100%	55.527.361	100%
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				
Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	4.860.634.825		4.257.057.700	
Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	4.860.634.825	100%	4.257.057.700	88%
Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	7.881.785.160		7.089.243.959	
Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	205.692.000	100%	202.551.650	90%
Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	4.776.755.870	100%	4.299.547.629	90%
Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	2.899.337.290	100%	2.587.144.680	89%
Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	1.501.718.560		1.313.689.948	
Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	1.501.718.560	100%	1.313.689.984	87%

Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	377.246.185		375.227.565	
Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	376.638.185	100%	374.625.057	99%
Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	608.000	100%	602.508	99%
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				
Penataan Prasarana Pertanian	9.254.426.583		9.057.167.951	
Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	57.279.000	100%	57.279.000	100%
Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	135.583.522	100%	130.499.300	96%
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	5.888.415.400	100%	5.709.573.051	97%
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	3.173.148.631	100%	3.159.816.600	100%
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER				
Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	548.445.380		540.764.048	
Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	548.445.380	100%	540.764.048	99%
Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	120.181.520		120.117.981	
Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Provinsi	120.181.520	100%	120.117.981	100%
Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	291.907.081		289.694.227	
Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	291.907.081	100%	289.694.227	99%
Kesejahteraan Hewan	38.700.000		35.896.097	
Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Kesejahteraan Hewan dan Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	38.700.000	100%	35.896.097	93%
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN				
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	455.450.280		447.184.000	

Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	455.450.280	100%	447.184.000	98%
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN				
Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	1.452.717.400		1.428.631.520	
Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	1.452.717.400	100%	1.428.631.520	98%
TOTAL	45.323.242.965		43.222.496.274	

Adapun Rekapitulasi hasil pelaksanaan Renja Dinas TPHP dan Pencapaian RENSTRA s/d Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini :



REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA TAHUN 2019-2022

Nama Perangkat Daerah : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun Berjalan 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Capaian Kinerja Lingkup SKPD (Poin)		-						
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4,00		4,00	4,00	97,98	3,00	3,00	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1,00		1,00	1,00	85,81	1,00	1,00	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1,00		1,00	1,00	85,32	1,00	1,00	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1,00		1,00	1,00	99,10	1,00	1,00	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1,00		1,00	1,00	100,00	1,00	1,00	100,00

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2,00		2,00	2,00	67,02		2,00	2,00	100,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4,00		4,00	4,00	72,09		4,00	4,00	100,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup SKPD (Persen)									
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	192,00		166,00	166,00	98,00		190,00	190,00	100,00
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12,00		12,00	12,00	100,00		12,00	12,00	100,00
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	12,00		12,00	12,00	49,00		12,00	12,00	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1,00		1,00	1,00	84,00		2,00	2,00	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	12,00		3,00	3,00	54,00		12,00	12,00	100,00
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1,00		1,00	0,00	-		1,00	1,00	100,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup SKPD (Persen)									
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5,00		5,00	3,00	49,00		1,00	1,00	100,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5,00		11,00	11,00	99,00		7,00	7,00	100,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1,00		1,00	1,00	75,00		1,00	1,00	100,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4,00		3,00	3,00	94,00		2,00	2,00	100,00

	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	4,00		2,00	2,00	100,00	1,00	1,00	100,00
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	26,00		26,00	26,00	100,00	1,00	1,00	100,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1,00		1,00	1,00	100,00	2,00	2,00	100,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)								
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	100,00		100,00	100,00	92,00	12,00	12,00	100,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3,00		3,00	3,00	94,00	3,00	3,00	100,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5,00		5,00	5,00	100,00	12,00	12,00	100,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)								
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	82,00		82,00	82,00	89,00	91,00	91,00	100,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2,00		2,00	2,00	88,00	2,00	2,00	100,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	10,00		10,00	10,00	98,00	2,00	2,00	100,00
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN									
	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Persentase Sarana Produksi Pertanian Yang Diedarkan/Disalurkan Sesuai Ketentuan Peraturan Yang Berlaku (Persen)								

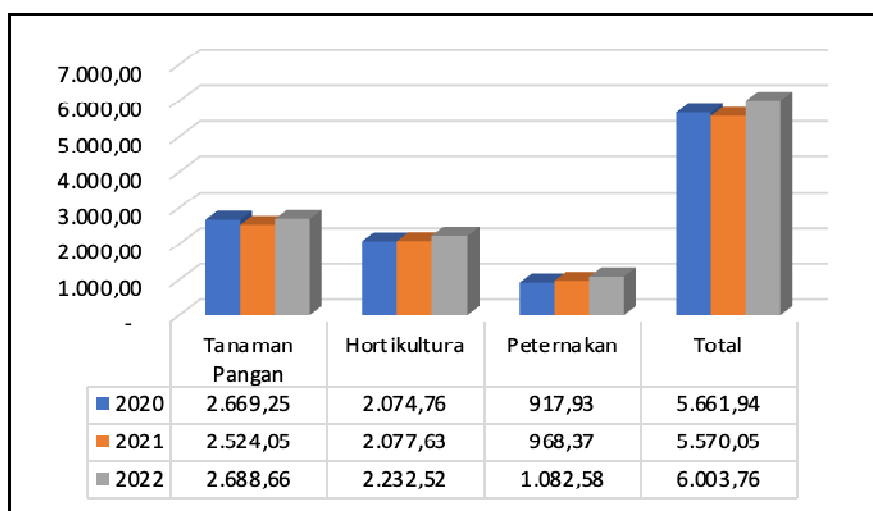
	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Laporan Pengawasan Peredaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian > 4 Laporan (Laporan)	6,00		100,00	100,00	99,00	6,00	6,00	100,00
	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Persentase Peredaran Benih/bibit Tanaman Pangan dan Hortikultura yang memenuhi Standar Sertifikasi Benih (Persen)								
	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah Sertifikat Benih yang terbitkan > 10 Sertifikat (Sertifikat)	150,00		200,00	200,00	98,00	225,00	225,00	100,00
	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Luas Cakupan Penyaluran/Distribusi Benih/Bibit Unggul Hortikultura (Hektar)	6,00		150,00	150,00	94,00	6,00	6,00	100,00
	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	Luas Cakupan Penyediaan Benih/Bibit Unggul Tanaman Pangan (Hektar)	18,00		1500,00	1500,00	91,00	6,00	6,00	100,00
	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Yang Berkualitas (Persen)								
	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Sentra Pengembangan dan Pengelolaan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan Serta Pakan Kewenangan Provinsi (Sentra)	6,00		5,00	5,00	99,00	5,00	5,00	100,00
	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah Bibit Ternak Dari Luar Provinsi yang Dikembangkan Pada Kawasan Peternakan (Ekor)								
	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah Penyediaan Bibit ternak dari Luar Provinsi (Ekor)	1000,00		1713,00	649,00	17,00	700,00	700,00	100,00
	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah Penyediaan Bibit Hijauan Pakan Ternak dari Luar Provinsi (Hektar)	650,00		30,00	30,00	98,00	387,00	0,00	-
	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	Rasio ketersediaan penyuluh yang kompeten > 90% (Persen)								
	Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN	Jumlah Penyuluh ASN Perkebunan yang menguasai standar teknis budidaya tanaman perkebunan dan kelembagaan petani > 107 (Orang)	40,00		0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	100,00
	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Persentase Kawasan Pengembangan Pertanian Yang Mengakses dan Menerapkan Teknologi Pertanian Berstandar GAP dan GHP (Persen)								

	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah Kelembagaan Petani yang Mengakses Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian yang di Diseminasikan (Kelompok)	6,00		20,00	20,00	95,00	14,00	14,00	100,00
--	--	---	------	--	-------	-------	-------	-------	-------	--------

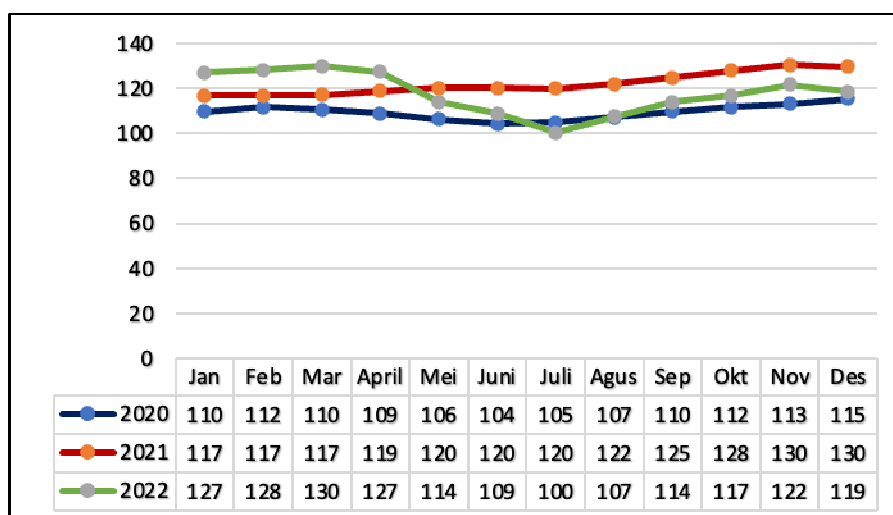
	Sapi		97.923	99.882	118.915	120.817	115.090	114.754	120.817	122.751		
	Kerbau		8.790	8.965	9.840	10.037	9.460	2.432	10.037	10.238		
	Kambing		254.249	259.334	201.922	204.345	199.150	201.551	204.345	206.797		
	Kuda		4.994	5.069	1.468	1.490	1.297	1.345	1.490	1.512		
	Babi		170.251	172.010	178.270	180.053	170.251	172.010	180.053	181.854		
	Unggas		7.743.030	7.859.176	8.856.007	9.033.127	7.675.274	7.793.970	9.033.127	9.213.789		

Secara garis besar, Trend perkembangan pencapaian kinerja Dinas TPHP Tahun 2020 – 2022 juga dapat dilihat pada diagram berikut ini :

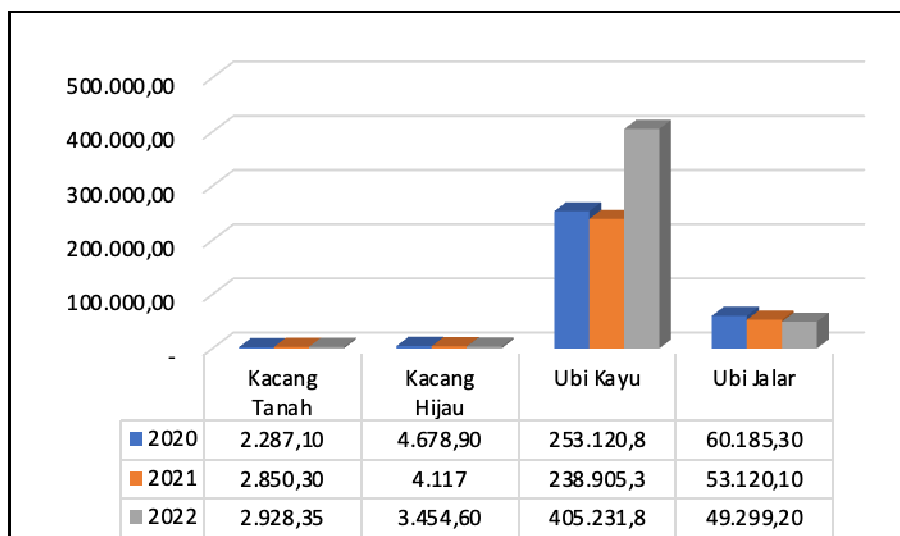
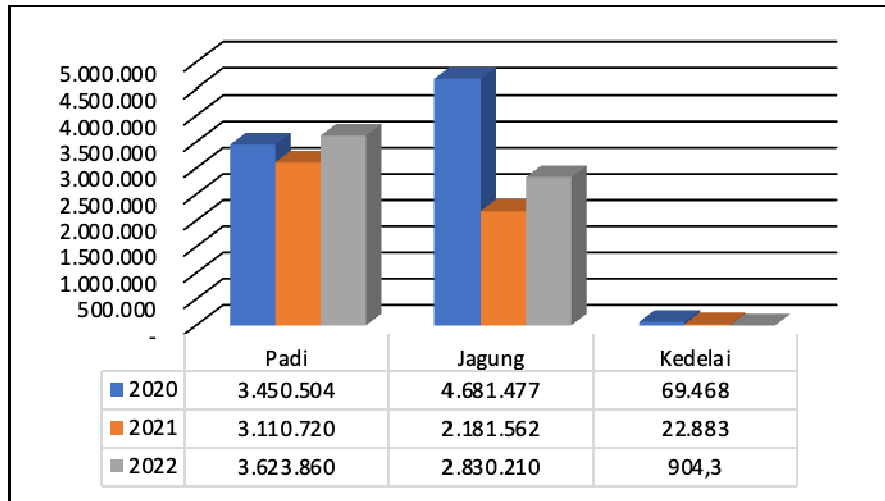
1. Capaian Kinerja PDRB Sulawesi Barat Per Sektor Tahun 2020 – 2022



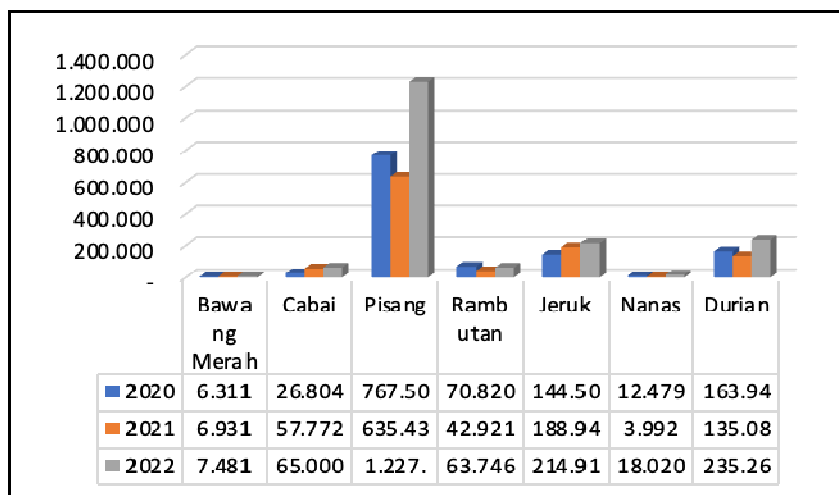
2. Capaian Kinerja NTP Prov. Sulawesi Barat Tahun 2020 dan 2022



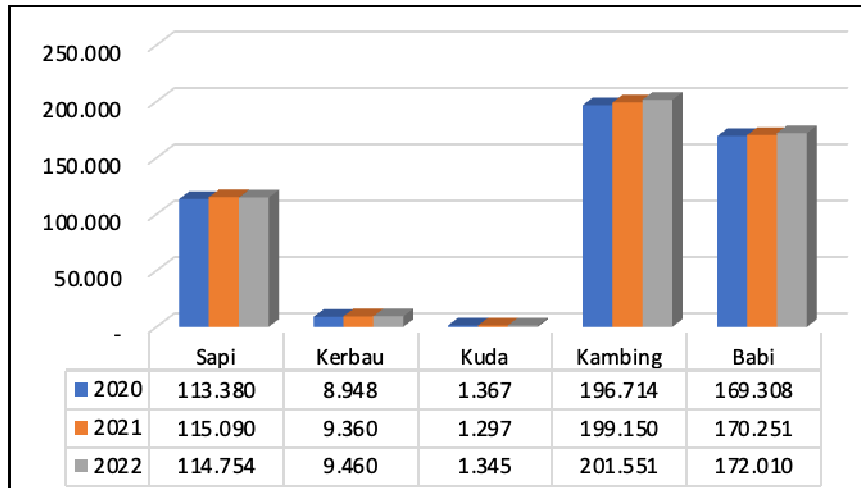
3. Capaian Kinerja Hasil Produksi Pengembangan Tanaman Pangan Jumlah Produksi Komoditas Tanaman Pangan (Kwintal) Tahun 2020 – 2022



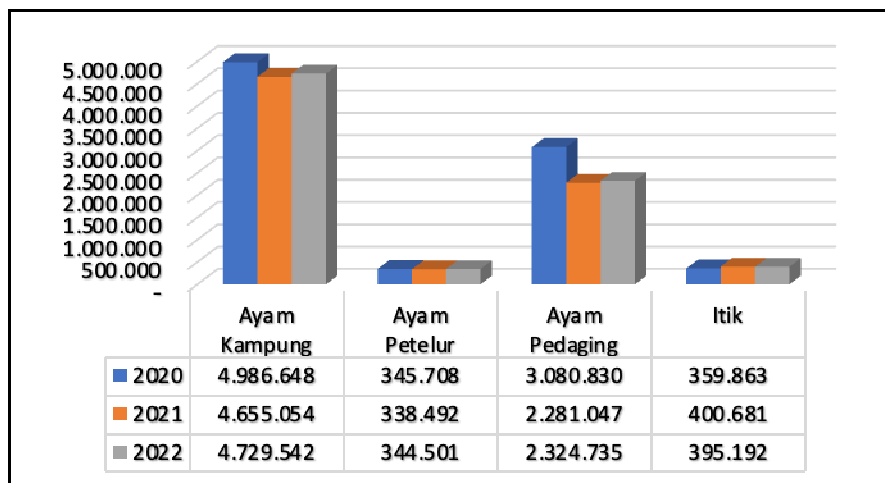
4. Capaian Kinerja Hasil Produksi Pengembangan Hortikultura
Jumlah Produksi Komoditas Hortikultura (Kwintal) Tahun 2020-2022



5. Capaian Kinerja Hasil Produksi Pengembangan Peternakan
a. Jumlah Populasi Ternak Besar dan Kecil (Ekor) Tahun 2020 – 2022



b. Jumlah Populasi Ternak Unggas (Ekor) Tahun 2020 - 2022



Deskripsi pencapaian kinerja Dinas TPHP pada Tahun 2022 diantaranya adalah penanganan Penyakit Mulut dan Kuku pada Ternak Besar dan Sedang sudah mencapai nol Kasus. Kasus penyakit jembrana pada sapi bali masih dalam penanganan. Kasus telah terjadi di kab Pasangkayu dan pada posisi sudah melandai dan laporan kematian terakhir per 3 Desember 2022. Namun demikian, peningkatan Populasi tetap ditunjukkan pada peningkatan jumlah hewan unggas yakni 7.675.274 ekor pada tahun 2021 dan 8.138.970 ekor pada tahun 2022.

Pada pengembangan tanaman sayuran Cabai dan bawang merah mendapat perhatian khusus oleh pemerintah provinsi pada tahun 2022 yakni mendapatkan anggaran DID dan BTT untuk penanganan Inflasi dan ketahanan pangan daerah. Peningkatan produksi pada 2 komoditi tersebut menunjukkan angka yang cukup baik yakni dari 2021 sebanyak 693,1 Ton menjadi 860,0 Ton pada bawang merah. dan cabai dari Tahun 2021 sebanyak 5.777 Ton menjadi 6.679 ton pada tahun 2022. terjadi pula pertambahan luas lahan 485 Ha pada tahun 2021 dan 491 Ha pada tahun 2022 untuk komoditi Bawang merah.

Pembangunan/ Rehabilitasi Jalan Usaha Tani mengalami pertambahan panjang yang cukup signifikan yakni pada tahun 2021 sepanjang 13.836 meter, pada tahun 2022 sepanjang 13.591,6 Meter sehingga untuk data panjang Jalan Usaha Tani dari tahun 2017 s/d 2022 menjadi 27.428 Meter. Pembangunan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier pada tahun 2022

sepanjang 5.082 Meter (dilakukan perhitungan untuk interfensi anggaran APBD). Sedangkan untuk penggunaan alat mesin pertanian yang berasal dari bantuan pemerintah mengalami penurunan diakibatkan peraturan undang undang yang membatasi.

Peningkatan produksi pula terjadi pada komoditi padi dan jagung. pada tahun 2021, produksi padi 311.072 Ton menjadi 362.386 Ton pada tahun 2022. Dan pada komoditi jagung sebanyak 218.156,22 ton menjadi 283.021,00 pada tahun 2022. terdapat pula gerakan merdeka pangan pada 2 komoditi tersebut, dengan tujuan untuk pertambahan luas lahan dan edukasi kepada petani tentang budidaya dan penggunaan teknologi yang baik. Dalam hal Perbanyak benih padi yang mencapai kurang lebih 30.000 Kg mampu menyumbang PAD sebesar Rp. 400.000.000.

Hal yang juga cukup berprogress signifikan yakni pada UPTD Laboratorium Keswan dan Kesmavet yang telah mampu memberikan pelayanan laboratorium dan klinik hewan serta Surveilans untuk penentuan nilai prefelensi daerah bebas kompartemen (status kesehatan daerah) dan pemeriksaan penyakit hewan menular strategis dan produk asal hewan.

II.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat

Isu penting Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Sulawesi Barat antara lain peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan peternakan, peningkatan kualitas sumber daya manusia pertanian, kelembagaan perbenihan tanaman pangan, hortikultura dan peternakan, peningkatan kemampuan kelembagaan petani tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, peningkatan ketersediaan sarana produksi pertanian, pengembangan pola kemitraan dengan petani penangkar, pelestarian dan pemanfaatan agens hayati dan pestisida nabati, pengelolaan air dan tanah berwawasan lingkungan dan berkesinambungan serta kemampuan adaptasi terhadap inovasi teknologi.

Disamping isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi di atas, terdapat pula permasalahan sektor pertanian diantaranya adalah alih fungsi lahan sawah dan kerusakan lingkungan akibat banjir bandang, belum optimalnya pemanfaatan lahan, penurunan kualitas lahan akibat penggunaan pupuk kimia secara terus menerus, fenomena iklim yang tidak menentu yang mengakibatkan produktivitas komoditi tanaman pangan dan hortikultura tidak menunjukkan persentase yang meningkat. Selain itu terdapat pula masalah pada rendahnya daya saing produk pertanian lokal. Dalam sektor peternakan, jumlah populasi ternak terutama sapi tidak menunjukkan peningkatan diakibatkan penyakit jembrana yang masih menyerang ternak masyarakat.

Upaya pemecahan dari masalah masalah tersebut, misalnya alih fungsi lahan yakni dengan penentuan alokasi luas lahan pertanian pada penyusunan RTRW atau menekan laju konversi lahan pertanian ke depan dengan bagaimana melindungi keberadaan lahan pertanian melalui optimalisasi, rehabilitasi dan ekstensifikasi lahan, pengembangan agribisnis tanaman pangan dan hortikultura yang berwawasan lingkungan, meningkatkan produktivitas lahan yakni dengan peningkatan Indeks Pertanaman (IP) atau intensitas tanam dan peningkatan produktivitas berbagai komoditi tanaman pangan dan hortikultura, melakukan pemberian bantuan benih/bibit tanaman pangan/hortikultura kepada masyarakat. Dalam hal, produk pertanian lokal yang kalah bersaing dengan produk dari luar daerah terutama komoditas hortikultura dan peternakan perlu dilakukan terobosan-terobosan untuk meningkatkan daya saing kedua komoditas ini, misalnya dengan bantuan mekanisasi pertanian, bantuan pupuk, bantuan benih dan bibit ternak serta bantuan permodalan bekerjasama dengan dinas kabupaten maupun BUMN atau Lembaga permodalan swasta

yang ada di Sulawesi Barat.

II.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Perencanaan Kinerja Tahunan merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam perencanaan 5 tahunan (RENSTRA), yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dari rancangan awal yang telah disusun pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat telah disesuaikan dengan perencanaan kinerja yang akan diimplementasikan ke dalam penetapan kinerja tahun berikutnya.

Dalam Dokumen Rencana Kerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat. Di samping itu, dokumen rencana kerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat. Review terhadap rancangan awal RKPD Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat.



No	Rancangan Awal SKPD					No	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp. 000)		Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12
					49.459.546.856						49.786.757.814	
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Nilai SAKIP Lingkup OPD (poin)	66.5	18.150.310.267	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Nilai SAKIP Lingkup OPD (poin)	66.5	19.454.888.225	
3.27.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				143.518.566,18	3.27.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	(SULAWESI BARAT)	Persentase Penyusunan Dokumen/Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Persentase)	100	304.170.340,00	
3.27.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	-	70.000.000,00	3.27.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)		164.144.940,00	
3.27.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	-	7.000.000,00	3.27.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)		10.000.000,00	

3.27.01.1 .01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	-	7.500.000,00	3.27.01.1 .01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)		9.000.000,00	
3.27.01.1 .01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD (Dokumen)	-	5.971.800,00	3.27.01.1 .01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)		5.971.800,00	
3.27.01.1 .01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	-	5.053.600,00	3.27.01.1 .01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)		5.053.600,00	
3.27.01.1 .01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	7.993.166,18	3.27.01.1 .01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian		10.000.000,00	

			(Laporan)						Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)			
3.27.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	-	40.000.000,00	3.27.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)		100.000.000,00	
3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				16.840.487.743,77	3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	(SULAWESI BARAT)	Persentase Realisasi Anggaran Penunjang Urusan Pengelolaan Keuangan Daerah (Persentase)	100	17.493.892.885,00	
3.27.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)		16.760.345.403,77	3.27.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)		17.403.750.545,00	
3.27.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)		15.000.000,00	3.27.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)		20.000.000,00	

3.27.01.1 .02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)		20.000.000,00	3.27.01.1 .02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)		20.000.000,00	
3.27.01.1 .02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)		15.000.000,00	3.27.01.1 .02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)		20.000.000,00	
3.27.01.1 .02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)		12.000.000,00	3.27.01.1 .02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)		12.000.000,00	
3.27.01.1 .02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)		11.537.120,00	3.27.01.1 .02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)		11.537.120,00	

3.27.01.1 .02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	(Dinas Tanaman Pangan, Hortikultur a dan Peternaka n Prov. Sulbar, KAB. MAMUJU)	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)		6.605.220,00	3.27.01.1 .02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	(Dinas Tanaman Pangan, Hortikultur a dan Peternaka n Prov. Sulbar, KAB. MAMUJU)	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)		6.605.220,00	
3.27.01.1 .05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				50.000.000,00	3.27.01.1 .05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	(SULAWE SI BARAT)	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup OPD (Persentase)	100	100.000.000,00	
3.27.01.1 .05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)		30.000.000,00	3.27.01.1 .05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)		50.000.000,00	
3.27.01.1 .05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan (Orang)		20.000.000,00	3.27.01.1 .05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan (Orang)		50.000.000,00	

3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				356.303.957,17	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	(SULAWESI BARAT)	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD (Persentase)	100	468.825.000,00	
3.27.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		10.302.000,00	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		11.825.000,00	
3.27.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		35.000.000,00	3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		41.000.000,00	
3.27.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)		35.000.000,00	3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)		80.000.000,00	
3.27.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		20.000.000,00	3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		45.000.000,00	

3.27.01.1 .06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)		15.000.000,00	3.27.01.1 .06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)		15.000.000,00	
3.27.01.1 .06.07	Penyediaan Bahan/Material		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)		25.000.000,00	3.27.01.1 .06.0007	Penyediaan Bahan/Material		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)		76.000.000,00	
3.27.01.1 .06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		216.001.957,17	3.27.01.1 .06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		200.000.000,00	
3.27.01.1 .07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				400.000.000,00	3.27.01.1 .07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	(SULAWESI BARAT)	Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah Lingkup OPD (Persentase)	100	57.000.000,00	
3.27.01.1 .07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	(Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Prov. Sulbar, KAB. MAMUJU)	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	5	375.000.000,00	3.27.01.1 .07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	(Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Prov. Sulbar, KAB. MAMUJU)	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	5	32.000.000,00	

3.27.01.1 .07.05	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)		25.000.000,00	3.27.01.1 .07.0005	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)		25.000.000,00	
3.27.01.1 .08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				230.000.000,00	3.27.01.1 .08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	(SULAWE SI BARAT)	Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persentase)	100	576.000.000,00	
3.27.01.1 .08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		15.000.000,00	3.27.01.1 .08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		100.000.000,00	
3.27.01.1 .08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		175.000.000,00	3.27.01.1 .08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		276.000.000,00	
3.27.01.1 .08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		40.000.000,00	3.27.01.1 .08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		200.000.000,00	

3.27.01.1 .09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				130.000.000,00	3.27.01.1 .09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	(SULAWE SI BARAT)	Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persentase)	100	455.000.000,00	
3.27.01.1 .09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		70.000.000,00	3.27.01.1 .09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		375.000.000,00	
3.27.01.1 .09.09	Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi (Unit)		45.000.000,00	3.27.01.1 .09.0009	Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi (Unit)		50.000.000,00	
3.27.01.1 .09.10	Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi (Unit)		15.000.000,00	3.27.01.1 .09.0010	Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi (Unit)		30.000.000,00	

3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		Persentase Ketersediaan Sarana Pertanian terhadap Lahan Pertanian (Persentase)	78	18.403.446.589	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		Persentase Ketersediaan Sarana Pertanian terhadap Lahan Pertanian (Persentase)	78	5.649.282.589	
3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian				1.301.030.000,00	3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	(Provinsi, Semua Kabupaten, SULAWESI BARAT)	Persentase Pengawasan dan Pelaporan Peredaran Sarana Produksi Pertanian (Persentase)	100	292.500.000,00	
3.27.02.1.01.01	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian		Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)		1.301.030.000,00	3.27.02.1.01.0001	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian		Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)		292.500.000,00	
3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman				13.569.589.589,00	3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	(Provinsi, Semua Kabupaten, SULAWESI BARAT)	Persentase Pengawasan Mutu Ketersediaan, Mutu Penyediaan dan Mutu Penyaluran Benih Tanaman (Persentase)	100	2.845.339.589,00	

3.27.02.1 .02.01	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih		Jumlah Sertifikat Benih (Sertifikat)		450.000.000,00	3.27.02.1 .02.0001	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih		Jumlah Sertifikat Benih (Sertifikat)		120.000.000,00	
3.27.02.1 .02.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	(6 Kabupaten , SULAWES I BARAT)	Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura (Laporan)	6	6.837.396.500,0 0	3.27.02.1 .02.0005	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	(6 Kabupaten , SULAWES I BARAT)	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan seusai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga (laporan)	6	2.725.339.589,00	
3.27.02.1 .02.03	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	(6 Kabupaten , SULAWES I BARAT)	Jumlah Benih/Bibit Tanaman Pangan yang Memenuhi Persyaratan Mutu, Penyediaan dan Peredaran (Dokumen)	18	6.282.193.089,0 0							

3.27.02.1 .04	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi				2.186.947.000,0 0	3.27.02.1 .04	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	(Provinsi, Semua Kabupaten, SULAWES I BARAT)	Persentase Ketersediaan Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Unggul (Persentase)	60	2.348.000.000,00	
3.27.02.1 .04.01	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	(6 Kabupaten, SULAWES I BARAT)	Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi (Dokumen)	2	350.000.000,00	3.27.02.1 .04.0001	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	(6 Kabupaten, SULAWES I BARAT)	Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi (Dokumen)	2	250.000.000,00	
3.27.02.1 .04.02	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	(6 Kabupaten, SULAWES I BARAT)	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi (Laporan)	6	1.248.000.000,0 0	3.27.02.1 .04.0004	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	(6 Kabupaten, SULAWES I BARAT)	Jumlah pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi (laporan)	6	898.000.000,00	

3.27.02.1 .04.03	Pengembangan Kapasitas Petugas Pengawas Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	(Kabupaten Mamuju, Kabupaten Polman, SULAWESI BARAT)	Jumlah Pengawas Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas (Orang)	12	588.947.000,00	3.27.02.1 .04.0005	Pengembangan Kapasitas Petugas Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan, Paramedik Veteriner, dan Medik Veteriner	(Kabupaten Mamuju, Kabupaten Polman, SULAWESI BARAT)	Jumlah Petugas Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan, Paramedik Veteriner, dan Medik Veteriner yang mengikuti pengembangan kapasitas (Orang)	12	1.200.000.000,00	
3.27.02.1 .05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi				214.000.000,00	3.27.02.1 .07	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	(Provinsi, Semua Kabupaten, SULAWESI BARAT)	Jumlah Penyediaan Bibit Ternak Dari Luar Provinsi (Ekor)	1000	163.443.000,00	
3.27.02.1 .05.01	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	(6 Kabupaten, SULAWESI BARAT)	Jumlah ketersediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia dan yang Diproduksi (Laporan)	2	150.000.000,00	3.27.02.1 .07.0002	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	(Polman, Majene, Mamasa, Mamuju, Mamuju Tengah, Pasangkayu, SULAWESI BARAT)	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain (Ton)	605	61.880.000,00	

3.27.02.1 .05.02	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan	(Polman, Majene, Mamasa, Mamuju, Mamuju Tengah, Pasangkayu, SULAWESI BARAT)	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan yang Beredar (Ton)	300	40.000.000,00	3.27.02.1 .07.0003	Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	(Polman, Majene, Mamasa, Mamuju, Mamuju Tengah, Pasangkayu, SULAWESI BARAT)	Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain (Dosis)	1000	101.563.000,00	
3.27.02.1 .05.03	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	(Polman, Majene, Mamasa, Mamuju, Mamuju Tengah, Pasangkayu, SULAWESI BARAT)	Jumlah Pengawasan Peredaran Benih/Bibit Ternak yang Beredar dan Bersertifikat (Laporan)	1	24.000.000,00							
3.27.02.1 .07	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain				1.131.880.000,00							
3.27.02.1 .07.01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	(Polman, Majene, Mamasa, Mamuju, Mamuju Tengah, Pasangkayu, SULAWESI BARAT)	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain (Ekor)	1000	825.000.000,00							

3.27.02.1 .07.02	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	(Polman, Majene, Mamasa, Mamuju, Mamuju Tengah, Pasangkayu, SULAWESI BARAT)	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain (Ton)	605	306.880.000,00							
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		Cakupan Layanan Prasarana Pertanian Spesifik Lokasi dan Sesuai Potensi Wilayah (Persentase)	78	7.221.150.000	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		Cakupan Layanan Prasarana Pertanian Spesifik Lokasi dan Sesuai Potensi Wilayah (Persentase)	78	12.483.925.000	
3.27.03.1 .01	Penataan Prasarana Pertanian				7.221.150.000,00	3.27.03.1 .01	Penataan Prasarana Pertanian	(Semua Kabupaten, SULAWESI BARAT)	Persentase Penyediaan Prasarana dan Pengembangan Lahan Pertanian Berdasarkan Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Komoditas (Persentase)	100	12.483.925.000,00	

3.27.03.1 .01.01	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian		Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian (Dokumen)		350.000.000,00	3.27.03.1 .01.0001	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian		Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian (Dokumen)		140.000.000,00	
3.27.03.1 .01.02	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian		Jumlah Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian (Dokumen)		325.000.000,00	3.27.03.1 .01.0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya		Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi (Unit)		12.343.925.000,00	
3.27.03.1 .01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani		Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani (Dokumen)		80.000.000,00							
3.27.03.1 .01.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani		Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani (Dokumen)		55.000.000,00							
3.27.03.1 .01.06	Pembangunan dan Pemeliharaan Pos Pemeriksaan Kesehatan Hewan		Jumlah Pos Pemeriksaan Kesehatan Hewan yang Dibangun dan Dipelihara (Unit)		400.000.000,00							

3.27.03.1 .01.07	Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian		Jumlah Laboratorium Pertanian yang Dibangun dan Dipelihara (Unit)		0,00							
3.27.03.1 .01.08	Pembangunan dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan		Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun dan Dipelihara (Unit)		0,00							
3.27.03.1 .01.10	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya		Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi (Unit)		6.011.150.000,0 0							

3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER		- Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular (Persentase) - Persentase Unit Usaha Produk Hewan yang Menerapkan Persyaratan Teknis Kesehatan dan Keamanan Produk Hewan (Persentase)	- 6.00 - 78	1.881.640.000	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER		- Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular (Persentase) - Persentase Unit Usaha Produk Hewan yang Menerapkan Persyaratan Teknis Kesehatan dan Keamanan Produk Hewan (Persentase)	- 78 - 78	3.297.000.000	
3.27.04.1.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				835.000.000,00	3.27.04.1.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	(Semua Kabupaten , SULAWESI BARAT)	Persentase Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Yang Tertangani (Persentase)	100	2.000.000.000,00	

3.27.04.1 .01.01	Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis		Jumlah Wilayah Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis (Laporan)		445.000.000,00	3.27.04.1 .01.0003	Penanggulanga n Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular		Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali (Laporan)		2.000.000.000,00	
3.27.04.1 .01.02	Pembebasan Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Jumlah Wilayah yang Mengalami Penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (Laporan)		50.000.000,00							
3.27.04.1 .01.03	Penanggulanga n Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular		Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali (Laporan)		340.000.000,00							
3.27.04.1 .02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi				89.640.000,00	3.27.04.1 .03	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	(Semua Kabupaten , SULAWES I BARAT)	Persentase Daerah Yang Menerapkan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/ Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan (Persentase)	100	1.205.000.000,00	

3.27.04.1 .05	Kesejahteraan Hewan				92.000.000,00	3.27.04.1 .05	Kesejahteraan Hewan	(Kab. Polewali mandar, Kab. Pasangkayu, SULAWESI BARAT)	Persentase Penerapan Standar Kesejahteraan Hewan (Persentase)	100	92.000.000,00	
3.27.04.1 .05.01	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Kesejahteraan Hewan dan Nomor Kontrol Veteriner (NKV)		Jumlah Sertifikat Kesejahteraan Hewan dan Nomor Kontrol Veteriner (NKV) (Sertifikat)		92.000.000,00	3.27.04.1 .05.0003	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV)		Jumlah sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV) (Sertifikat)		92.000.000,00	
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN		Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian (Persentase)	78	833.000.000	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian (Persentase)		78	221.000.000	
3.27.05.1 .01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi				833.000.000,00	3.27.05.1 .01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	(Semua Kabupaten, SULAWESI BARAT)	Persentase Bencana Pertanian Provinsi Yang Tertanggulangi (Persentase)	100	221.000.000,00	

3.27.05.1 .01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	(Kab. Polman, Mamuju, Mamuju Tengah, Pasangkayu,, SULAWESI BARAT)	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Ha)	97.50	495.000.000,00	3.27.05.1 .01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	(Kab. Polman, Mamuju, Mamuju Tengah, Pasangkayu,, SULAWESI BARAT)	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Ha)	97.50	70.000.000,00	
3.27.05.1 .01.02	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	(Di sesuaikan dengan lokasi bencana, SULAWESI BARAT)	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani (Ha)	450	338.000.000,00	3.27.05.1 .01.0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	(Di sesuaikan dengan lokasi bencana, SULAWESI BARAT)	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani (Ha)	450	151.000.000,00	
3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN		Persentase Pemenuhan Legalitas Perizinan Usaha Pertanian (Persentase)	30	375.000.000	3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN		Persentase Pemenuhan Legalitas Perizinan Usaha Pertanian (Persentase)	30	225.000.000	
3.27.06.1 .01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota				375.000.000,00	3.27.06.1 .01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	(Semua Kabupaten , SULAWESI BARAT)	Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi (Persentase)	70	225.000.000,00	

3.27.06.1 .01.01	Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian		Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian (Dokumen)		100.000.000,00	3.27.06.1 .01.0001	Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian		Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian (Dokumen)		50.000.000,00	
3.27.06.1 .01.02	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota		Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota (Dokumen)		200.000.000,00	3.27.06.1 .01.0002	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota		Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota (Dokumen)		175.000.000,00	
3.27.06.1 .01.03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian		Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi (Laporan)		75.000.000,00							
3.27.06.1 .03	Penerbitan Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan				-							
3.27.06.1 .03.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan		Jumlah Izin Usaha Distributor Obat Hewan yang Memenuhi Komitmen (Laporan)		0							

3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian				1.470.000.000,00	3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	(Kab Polman, Kab Majene, Kab Mamasa, SULAWESI BARAT)	Cakupan Layanan Penyuluh Pertanian Yang Profesional (Persentase)	100	5.671.000.000,00	
3.27.07.1.02.01	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	(Wilayah luar Prov. Sulbar, Luar Wilayah)	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian (Dokumen)	6	1.050.000.000,00	3.27.07.1.02.0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	(Kab. Polman, Mamuju Tengah dan Mamasa, SULAWESI BARAT)	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan (Kelompok)	40	5.671.000.000,00	
3.27.07.1.02.02	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	(Kab. Polman, Mamuju Tengah dan Mamasa, SULAWESI BARAT)	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan (Kelompok)	40	420.000.000,00							
3.27.07.1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan				1.125.000.000,00	3.27.07.1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	(Kab. Pasangkayu, Kab. Mamasa, Kab. Mamuju Tengah, Kab. Mamuju, Kab. Majene, SULAWESI BARAT)	Persentase Kelembagaan Ekonomi Petani Yang Terkelola Baik Pada Kawasan Pertanian Berbasis Koorporasi (Persentase)	100	2.784.662.000,00	

II.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, dalam penyusunannya perlu memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan atau melalui reses anggota DPRD yang dituangkan dalam pokok pokok pikiran DPRD yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat. Usulan masyarakat melalui pokok pokok pikiran DPRD dan melalui musrenbang Tahun 2024 yang telah dituangkan dalam database SIPD Kemendagri RI sebanyak 129 usulan adalah sebagai berikut :



POKOK POKOK PIKIRAN DPRD TAHUN 2024

No	Sumber Usulan	Usulan	Volume / Satuan	Pagu	Perangkat Daerah / Bidang / Program / Kegiatan / Subkegiatan
1	MUHTAR, SP.	DTPHP - Bantuan Bibit Bawang Merah	6.000,00 / Kg	500.000.000,00	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
	USULANSKPDELAH				3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
	76.04				3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
	KAB. POLEWALI MANDAR				3.27.02.1.02 - Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman
	USULANKAB 76.04 KAB. POLEWALI MANDAR				3.27.02.1.02.02 -
2	MUHTAR, SP.	DTPHP - Bantuan Bibit Durian Musangking	5.000,00 / Batang	750.000.000,00	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
	USULANSKPDELAH				3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
	76.04				3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
	KAB. POLEWALI MANDAR				3.27.02.1.02 - Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman
	USULANKAB 76.04 KAB. POLEWALI MANDAR				3.27.02.1.02.02 -
3	MUHTAR, SP.	DTPHP - Bantuan Bibit Durian Otong	5.000,00 / Batang	375.000.000,00	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
	USULANSKPDELAH				3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
	76.04				3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
	KAB. POLEWALI MANDAR				3.27.02.1.02 - Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman
	USULANKAB 76.04 KAB. POLEWALI MANDAR				3.27.02.1.02.02 -
4	MUHTAR, SP.	DTPHP - Bibit Jagung Manis	5.000,00 / Kg	50.000.000,00	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
	USULANSKPDELAH				3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
	76.04				3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
	KAB. POLEWALI MANDAR				3.27.02.1.02 - Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman

	USULANKAB 76.04 KAB. POLEWALI MANDAR				3.27.02.1.02.02 -
5	MUHTAR, SP.	DTPHP - Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik Padat, Cair dan Hayati	1,00 / Kegiatan	250.000.000,00	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Pternakan
	USULANSKPDETELAAH				3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
	76.04				3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
	KAB. POLEWALI MANDAR				3.27.07.1.02 - Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian
	SYARIFUDDIN, SH.				3.27.07.1.02.02 -
6	MUHTAR, SP.	DTPHP - Bimtek/pelatihan Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Koorporasi	1,00 / Paket	250.000.000,00	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Pternakan
	USULANSKPDETELAAH				3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
	76.05				3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
	KAB. MAJENE				3.27.07.1.02 - Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian
	(DEWAN) Perwakilan Masyarakat (MUH. SALEH). - Klp masyarakatM. DALIF ARSYAD				3.27.07.1.02.02 -
7	MUHTAR, SP.	DTPHP - Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik Padat, Cair dan Hayati	1,00 / Kelompok	250.000.000,00	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Pternakan
	USULANSKPDETELAAH				3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
	76.02				3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
	KAB. MAMUJU				3.27.07.1.02 - Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian
	H. MUHAMMAD JAYADI, S.Ag, SH.,MH				3.27.07.1.02.02 -
8	MUHTAR, SP.	DTPHP - Bimtek/pelatihan Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Koorporasi	1,00 / Kelompok	250.000.000,00	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Pternakan
	USULANSKPDETELAAH				3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
	76.02				3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
	KAB. MAMUJU				3.27.07.1.02 - Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian
	MUHAMMAD HATTA KAINANG, S.H.				3.27.07.1.02.02 -
9	MUHTAR, SP.	DTPHP - Bimtek/pelatihan	1,00 / Kelompok	250.000.000,00	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Pternakan

	USULANSKPDELAH	Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Korporasi			3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	
	76.02					3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
	KAB. MAMUJU					3.27.07.1.02 - Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian
	H. MUHAMMAD JAYADI, S.Ag, SH.,MH					3.27.07.1.02.02 -
10	MUHTAR, SP.	DTPHP - Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik Padat, Cair dan Hayati	2,00 / Kelompok	250.000.000,00	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Pternakan	
	USULANSKPDELAH				3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	
	76.02				3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	
	KAB. MAMUJU				3.27.07.1.02 - Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	
	MUHAMMAD HATTA KAINANG, S.H.				3.27.07.1.02.02 -	
11	MUHTAR, SP.	DTPHP - Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik Padat, Cair dan Hayati	1,00 / Kelompok	250.000.000,00	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Pternakan	
	USULANSKPDELAH				3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	
	76.02				3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	
	KAB. MAMUJU				3.27.07.1.02 - Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	
	MUHAMMAD HATTA KAINANG, S.H.				3.27.07.1.02.02 -	
12	MUHTAR, SP.	DTPHP - Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik Padat, Cair dan Hayati	1,00 / Kegiatan	250.000.000,00	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Pternakan	
	USULANSKPDELAH				3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	
	76.02				3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	
	KAB. MAMUJU				3.27.07.1.02 - Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	
	H. MUHAMMAD JAYADI, S.Ag, SH.,MH				3.27.07.1.02.02 -	
13	MUHTAR, SP.	DTPHP - Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik Padat, Cair dan Hayati	1,00 / Kelompok	250.000.000,00	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Pternakan	
	USULANSKPDELAH				3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	
	76.02				3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	
	KAB. MAMUJU				3.27.07.1.02 - Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	
	H. MUHAMMAD JAYADI, S.Ag, SH.,MH				3.27.07.1.02.02 -	

14	MUHTAR, SP.	DTPHP - Bimtek/pelatihan Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Koorporasi	1,00 / Kegiatan	250.000.000,00	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
	USULANSKPDELAH				3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
	76.04				3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
	KAB. POLEWALI MANDAR				3.27.07.1.02 - Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian
	H. ABDUL RAHIM, S.Ag., M.H.				3.27.07.1.02.02 -
15	MUHTAR, SP.	DTPHP - Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik Padat, Cair dan Hayati	1,00 / Paket	250.000.000,00	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
	USULANSKPDELAH				3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
	76.04				3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
	KAB. POLEWALI MANDAR				3.27.07.1.02 - Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian
	Ir. A. MUSLIM FATTAH				3.27.07.1.02.02 -
16	MUHTAR, SP.	DTPHP - Bantuan Bibit Alpukat kateki	5.000,00 / Batang	124.000,00	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
	USULANSKPDELAH				3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
	76.03				3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
	KAB. MAMASA				3.27.02.1.02 - Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman
	BONGGALANGI, SE., M.A.				3.27.02.1.02.02 -
17	MUHTAR, SP.	DTPHP - Bantuan Bibit Nenas/ Nenas Pamboang	2.000,00 / Batang	12.000,00	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
	USULANSKPDELAH				3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
	76.03				3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
	KAB. MAMASA				3.27.02.1.02 - Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman
	BONGGALANGI, SE., M.A.				3.27.02.1.02.02 -
18	MUHTAR, SP.	DTPHP - Bantuan Benih Cabai	300,00 / Gram	204.000,00	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
	USULANSKPDELAH				3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
	76.03				3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN

	KAB. MAMASA				3.27.02.1.02 - Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman
	BONGGALANGI, SE., M.A.				3.27.02.1.02.02 -
19	MUHTAR, SP.	DTPHP - Bantuan Bibit Bawang Merah	1.600,00 / Kg	84.500,00	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
	USULANSKPDELAH				3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
	76.02				3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
	KAB. MAMUJU				3.27.02.1.02 - Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman
	H. ABDUL RAHIM, S.Ag., M.H.				3.27.02.1.02.02 -
20	MUHTAR, SP.	DTPHP - Bantuan Bibit Durian Otong	200,00 / Batang	104.000,00	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
	USULANSKPDELAH				3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
	76.02				3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
	KAB. MAMUJU				3.27.02.1.02 - Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman
	MUHAMMAD HATTA KAINANG, S.H.				3.27.02.1.02.02 -
21	MUHTAR, SP.	DTPHP - Bantuan Bibit Durian Musangking	400,00 / Batang	204.000,00	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
	USULANSKPDELAH				3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
	76.05				3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
	KAB. MAJENE				3.27.02.1.02 - Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman
	H. KALMA KATTA, S.Sos., M.M.				3.27.02.1.02.02 -
22	MUHTAR, SP.	DTPHP - Bantuan Bibit Bawang Merah	800,00 / Kg	84.500,00	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
	USULANSKPDELAH				3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
	76.05				3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
	KAB. MAJENE				3.27.02.1.02 - Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman
	Drs. H. ITOL SYAIFUL TONRA, MM.				3.27.02.1.02.02 -
23	MUHTAR, SP.	DTPHP - Bibit Jagung Manis	16,00 / Kg	5.000.000,00	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan

	USULANSKPDELAH				3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
	76.03				3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
	KAB. MAMASA				3.27.02.1.02 - Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman
	JUNSETBUDI BOMBONG				3.27.02.1.02.02 -
24	MUHTAR, SP.	DTPHP - Bibit Jagung Manis	16,00 / Kg	5.000.000,00	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
	USULANSKPDELAH				3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
	76.04				3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
	KAB. POLEWALI MANDAR				3.27.02.1.02 - Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman
	Drs. H. HASAN BADO				3.27.02.1.02.02 -
25	MUHTAR, SP.	DTPHP - Bibit Jagung Manis	40,00 / Kg	5.000.000,00	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
	USULANSKPDELAH				3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
	76.03				3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
	KAB. MAMASA				3.27.02.1.02 - Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman
	BONGGALANGI, SE., M.A.				3.27.02.1.02.02 -
26	MUHTAR, SP.	DTPHP - Bibit Jagung Manis	16,00 / Kg	5.000.000,00	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
	USULANSKPDELAH				3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
	76.03				3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
	KAB. MAMASA				3.27.02.1.02 - Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman
	SABAR BUDIMAN				3.27.02.1.02.02 -
27	MUHTAR, SP.	DTPHP - Bibit Jagung Manis	16,00 / Kg	5.000.000,00	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
	USULANSKPDELAH				3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
	76.01				3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
	KAB. PASANGKAYU				3.27.02.1.02 - Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman
	H. AMBO INTANG				3.27.02.1.02.02 -

28	MUHTAR, SP.	DTPHP - Bibit Jagung Manis	16,00 / Kg	5.000.000,00	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
	USULANSKPDELAAH				3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
	76.06				3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
	KAB. MAMUJU TENGAH				3.27.02.1.02 - Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman
	H. SUKARDY MUHAMMAD NOER				3.27.02.1.02.02 -
29	MUHTAR, SP.	DTPHP - Bibit Jagung Manis	16,00 / Kg	5.000.000,00	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
	USULANSKPDELAAH				3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
	76.02				3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
	KAB. MAMUJU				3.27.02.1.02 - Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman
	H. ARIF DAENG MATTEMMU, SE., M.Kes.				3.27.02.1.02.02 -
30	MUHTAR, SP.	DTPHP - Bibit Jagung Manis	16,00 / Kg	5.000.000,00	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
	USULANSKPDELAAH				3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
	76.02				3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
	KAB. MAMUJU				3.27.02.1.02 - Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman
	H. MUHAMMAD JAYADI, S.Ag, SH.,MH				3.27.02.1.02.02 -
31	MUHTAR, SP.	DTPHP - Bibit Jagung Manis	40,00 / Kg	5.000.000,00	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
	USULANSKPDELAAH				3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
	76.02				3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
	KAB. MAMUJU				3.27.02.1.02 - Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman
	H. DAMRIS, S.Pd.				3.27.02.1.02.02 -
32	MUHTAR, SP.	DTPHP - Bibit Jagung Manis	16,00 / Kg	5.000.000,00	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
	USULANSKPDELAAH				3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
	76.04				3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
	KAB. POLEWALI MANDAR				3.27.02.1.02 - Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman

	JUNSETBUDI BOMBONG				3.27.02.1.02.02 -
33	MUHTAR, SP.	DTPHP - Bibit Jagung Manis	16,00 / Kg	5.000.000,00	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
	USULANSKPDELAH				3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
	76.04				3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
	KAB. POLEWALI MANDAR				3.27.02.1.02 - Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman
	H. M. ARSAT SAGGAP, S.E.				3.27.02.1.02.02 -
34	MUHTAR, SP.	DTPHP - Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik Padat, Cair dan Hayati	1,00 / Kegiatan	100.000.000,00	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
	USULANSKPDELAH				3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
	76.04				3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
	KAB. POLEWALI MANDAR				3.27.07.1.02 - Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian
	Ir. A. MUSLIM FATTAH				3.27.07.1.02.02 -
35	MUHTAR, SP.	DTPHP - Bimtek/pelatihan Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Koorporasi	1,00 / Paket	200.000.000,00	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
	USULANSKPDELAH				3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
	76.02				3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
	KAB. MAMUJU				3.27.07.1.02 - Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian
	H. DAMRIS, S.Pd.				3.27.07.1.02.02 -
36	MUHTAR, SP.	DTPHP - Bimtek/pelatihan Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Koorporasi	1,00 / Paket	200.000.000,00	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
	USULANSKPDELAH				3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
	76.01				3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
	KAB. PASANGKAYU				3.27.07.1.02 - Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian
	Dr. H. MARIGUN RASYID, SH, MH., M.Si.				3.27.07.1.02.02 -
37	MUHTAR, SP.	DTPHP - Pelatihan Smart Farming Budidaya Padi	1,00 / Paket	200.000.000,00	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
	USULANSKPDELAH				3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
	76.01				3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
	KAB. PASANGKAYU				3.27.07.1.02 - Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian

	Ir. H. ABIDIN ABDULLAH				3.27.07.1.02.02 -
38	MUHTAR, SP.	DTPHP - Pelatihan Smart Farming Budidaya Padi	1,00 / Paket	200.000.000,00	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
	USULANSKPDELAH				3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
	76.01				3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
	KAB. PASANGKAYU				3.27.07.1.02 - Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian
	Ir. H. ABIDIN ABDULLAH				3.27.07.1.02.02 -
39	MUHTAR, SP.	DTPHP - Bimtek/pelatihan Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Koorporasi	1,00 / Paket	200.000.000,00	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
	USULANSKPDELAH				3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
	76.02				3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
	KAB. MAMUJU				3.27.07.1.02 - Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian
	MUHAMMAD HATTA KAINANG, S.H.				3.27.07.1.02.02 -
40	MUHTAR, SP.	DTPHP - Bantuan Bibit Durian Musangking	200,00 / Batang	204.000,00	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
	USULANSKPDELAH				3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
	76.01				3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
	KAB. PASANGKAYU				3.27.02.1.02 - Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman
	Dr. H. MARIGUN RASYID, SH, MH., M.Si.				3.27.02.1.02.02 -
41	MUHTAR, SP.	DTPHP - Bantuan Bibit Durian Musangking	200,00 / Batang	204.000,00	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
	USULANSKPDELAH				3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
	76.01				3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
	KAB. PASANGKAYU				3.27.02.1.02 - Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman
	Dr. H. MARIGUN RASYID, SH, MH., M.Si.				3.27.02.1.02.02 -
42	MUHTAR, SP.	DTPHP - Bantuan Bibit Durian Musangking	200,00 / Batang	204.000,00	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
	USULANSKPDELAH				3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
	76.01				3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
	KAB. PASANGKAYU				3.27.02.1.02 - Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman

	ANDI MUHAMMAD QUSYAIRY, A.Md., Tra.				3.27.02.1.02.02 -
43	MUHTAR, SP.	DTPHP - Bantuan Bibit Durian Otong	200,00 / Batang	104.000,00	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
	USULANSKPDELAH				3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
	76.04				3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
	KAB. POLEWALI MANDAR				3.27.02.1.02 - Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman
	Ir. A. MUSLIM FATTAH				3.27.02.1.02.02 -
44	MUHTAR, SP.	DTPHP - Bantuan Bibit Durian Otong	200,00 / Batang	104.000,00	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
	USULANSKPDELAH				3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
	76.01				3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
	KAB. PASANGKAYU				3.27.02.1.02 - Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman
	Dr. H. MARIGUN RASYID, SH, MH., M.Si.				3.27.02.1.02.02 -
45	MUHTAR, SP.	DTPHP - Bantuan Bibit Durian Musangking	200,00 / Batang	204.000,00	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
	USULANSKPDELAH				3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
	76.03				3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
	KAB. MAMASA				3.27.02.1.02 - Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman
	JUNSETBUDI BOMBONG				3.27.02.1.02.02 -
46	MUHTAR, SP.	DTPH - Bantuan Bibit Alpukat Kendil	10.000,00 / Batang	124.000,00	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
	USULANSKPDELAH				3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
	76.03				3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
	KAB. MAMASA				3.27.02.1.02 - Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman
	JUNSETBUDI BOMBONG				3.27.02.1.02.02 -

47	MUHTAR, SP.	DTPHP - Bantuan Bibit Alpukat kateki	800,00 / Batang	124.000,00	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
	USULANSKPDELAAH				3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
	76.03				3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
	KAB. MAMASA				3.27.02.1.02 - Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman
	JUNSETBUDI BOMBONG				3.27.02.1.02.02 -
48	MUHTAR, SP.	DTPHP - Bantuan Bibit Alpukat kateki	800,00 / Batang	124.000,00	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
	USULANSKPDELAAH				3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
	76.03				3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
	KAB. MAMASA				3.27.02.1.02 - Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman
	BONGGALANGI, SE., M.A.				3.27.02.1.02.02 -
49	MUHTAR, SP.	DTPHP - Bantuan Bibit Alpukat kateki	800,00 / Batang	124.000,00	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
	USULANSKPDELAAH				3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
	76.03				3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
	KAB. MAMASA				3.27.02.1.02 - Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman
	BONGGALANGI, SE., M.A.				3.27.02.1.02.02 -
50	MUHTAR, SP.	DTPHP - Bantuan Bibit Alpukat kateki	800,00 / Batang	124.000,00	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
	USULANSKPDELAAH				3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
	76.03				3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
	KAB. MAMASA				3.27.02.1.02 - Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman
	BONGGALANGI, SE., M.A.				3.27.02.1.02.02 -
51	MUHTAR, SP.	DTPHP - Bantuan Bibit Alpukat kateki	800,00 / Batang	124.000,00	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
	USULANSKPDELAAH				3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
	76.03				3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
	KAB. MAMASA				3.27.02.1.02 - Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman

	JUNSETBUDI BOMBONG				3.27.02.1.02.02 -
52	MUHTAR, SP.	DTPHP - Bantuan Bibit Durian Otong	1.000,00 / Batang	204.000,00	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
	USULANSKPDELAH				3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
	76.04				3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
	KAB. POLEWALI MANDAR				3.27.02.1.02 - Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman
	USMAN SUHURIAH				3.27.02.1.02.02 -
53	MUHTAR, SP.	DTPHP - Bantuan Bibit Alpukat kateki	800,00 / Batang	124.000,00	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
	USULANSKPDELAH				3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
	76.03				3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
	KAB. MAMASA				3.27.02.1.02 - Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman
	JUNSETBUDI BOMBONG				3.27.02.1.02.02 -
54	MUHTAR, SP.	DTPHP - Bantuan Benih Cabai	300,00 / Gram	204.000,00	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
	USULANSKPDELAH				3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
	76.03				3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
	KAB. MAMASA				3.27.02.1.02 - Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman
	BONGGALANGI, SE., M.A.				3.27.02.1.02.02 -
55	MUHTAR, SP.	DTPHP - Bantuan Bibit Durian Musangking	1.000,00 / Batang	204.000,00	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
	USULANSKPDELAH				3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
	76.04				3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
	KAB. POLEWALI MANDAR				3.27.02.1.02 - Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman
	SUKRI, S.Sos				3.27.02.1.02.02 -
56	MUHTAR, SP.	DTPHP - Bantuan Bibit Bawang Merah	1.600,00 / Kg	84.500,00	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
	USULANSKPDELAH				3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
	76.04				3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN

	KAB. POLEWALI MANDAR				3.27.02.1.02 - Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman
	MUHAMMAD HATTA KAINANG, S.H.				3.27.02.1.02.02 -
57	MUHTAR, SP.	DTPHP - Bantuan Bibit Alpukat kateki	800,00 / Batang	124.000,00	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
	USULANSKPDELAH				3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
	76.01				3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
	KAB. PASANGKAYU				3.27.02.1.02 - Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman
	Dr. H. MARIGUN RASYID, SH, MH., M.Si.				3.27.02.1.02.02 -
58	MUHTAR, SP.	DTPHP - Bantuan Bibit Alpukat kateki	1.000,00 / Batang	124.000,00	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
	USULANSKPDELAH				3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
	76.04				3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
	KAB. POLEWALI MANDAR				3.27.02.1.02 - Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman
	H. ABDUL HALIM				3.27.02.1.02.02 -
59	MUHTAR, SP.	DTPHP - Bantuan Bibit Durian Musangking	200,00 / Batang	204.000,00	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
	USULANSKPDELAH				3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
	76.01				3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
	KAB. PASANGKAYU				3.27.02.1.02 - Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman
	ANDI MUHAMMAD QUSYAIRY, A.Md., Tra.				3.27.02.1.02.02 -
60	MUHTAR, SP.	DTPHP - Bantuan Bibit Durian Musangking	200,00 / Batang	204.000,00	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
	USULANSKPDELAH				3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
	76.01				3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
	KAB. PASANGKAYU				3.27.02.1.02 - Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman

	ANDI MUHAMMAD QUSYAIRY, A.Md., Tra.				3.27.02.1.02.02 -
61	MUHTAR, SP.	DTPH - Bantuan Bibit Alpukat Kendil	1.000,00 / Batang	124.000,00	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
	USULANSKPDETELAAH				3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
	76.04				3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
	KAB. POLEWALI MANDAR				3.27.02.1.02 - Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman
	Drs. H. HASAN BADO				3.27.02.1.02.02 -
62	MUHTAR, SP.	DTPHP - Bantuan Benih Cabai	300,00 / Gram	204.000,00	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
	USULANSKPDETELAAH				3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
	76.04				3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
	KAB. POLEWALI MANDAR				3.27.02.1.02 - Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman
	H. ABDUL RAHIM, S.Ag., M.H.				3.27.02.1.02.02 -
63	MUHTAR, SP.	DTPHP - Bantuan Bibit Rambutan Binjai	200,00 / Batang	204.000,00	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
	USULANSKPDETELAAH				3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
	76.04				3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
	KAB. POLEWALI MANDAR				3.27.02.1.02 - Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman
	H. ABDUL RAHIM, S.Ag., M.H.				3.27.02.1.02.02 -
64	MUHTAR, SP.	DTPHP - Bantuan Bibit Durian Otong	200,00 / Batang	204.000,00	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
	USULANSKPDETELAAH				3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
	76.02				3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
	KAB. MAMUJU				3.27.02.1.02 - Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman
	H. MUHAMMAD JAYADI, S.Ag, SH.,MH				3.27.02.1.02.02 -
65	MUHTAR, SP.	DTPHP - Pelatihan Budidaya Jamur Tiram Kelompok	2,00 / Kegiatan	250.000.000,00	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
	USULANSKPDETELAAH				3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

	76.04	Wanita Tani			3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
	KAB. POLEWALI MANDAR				3.27.07.1.02 - Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian
	USMAN SUHURIAH				3.27.07.1.02.02 -
66	MUHTAR, SP.	DTPHP - Bantuan Bibit Bawang Merah	3.200,00 / Kg	84.500,00	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
	USULANSKPDELAH				3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
	76.05				3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
	KAB. MAJENE				3.27.02.1.02 - Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman
	H. KALMA KATTA, S.Sos., M.M.				3.27.02.1.02.02 -
67	MUHTAR, SP.	DTPHP - Bantuan Bibit Bawang Merah	1.600,00 / Kg	84.500,00	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
	USULANSKPDELAH				3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
	76.04				3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
	KAB. POLEWALI MANDAR				3.27.02.1.02 - Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman
	H. ABDUL RAHIM, S.Ag., M.H.				3.27.02.1.02.02 -
68	MUHTAR, SP.	DTPHP - Bantuan Bibit Durian Musangking	200,00 / Batang	204.000,00	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
	USULANSKPDELAH				3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
	76.05				3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
	KAB. MAJENE				3.27.02.1.02 - Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman
	M. DALIF ARSYAD				3.27.02.1.02.02 -
69	MUHTAR, SP.	DTPHP - Pelatihan Smart Farming Budidaya Padi	2,00 / Kegiatan	250.000.000,00	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
	USULANSKPDELAH				3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
	76.02				3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
	KAB. MAMUJU				3.27.07.1.02 - Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian

	Hj. ST. SURAIDAH SUHARDI, SE., M.Si.				3.27.07.1.02.02 -
70	MUHTAR, SP.	DTPHP - Bantuan Bibit Durian Musangking	200,00 / Batang	204.000,00	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Pternakan
	USULANSKPDETELAAH				3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
	76.04				3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
	KAB. POLEWALI MANDAR				3.27.02.1.02 - Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman
	H. ABDUL RAHIM, S.Ag., M.H.				3.27.02.1.02.02 -
71	MUHTAR, SP.	DTPHP - Bantuan Bibit Bawang Merah	1.600,00 / Kg	84.500,00	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Pternakan
	USULANSKPDETELAAH				3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
	76.05				3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
	KAB. MAJENE				3.27.02.1.02 - Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman
	Drs. H. ITOL SYAIFUL TONRA, MM.				3.27.02.1.02.02 -
72	MUHTAR, SP.	DTPHP - Bantuan Benih Cabai	300,00 / Gram	204.000,00	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Pternakan
	USULANSKPDETELAAH				3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
	76.04				3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
	KAB. POLEWALI MANDAR				3.27.02.1.02 - Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman
	H. ABDUL RAHIM, S.Ag., M.H.				3.27.02.1.02.02 -
73	MUHTAR, SP.	DTPHP - Bantuan Bibit Durian Musangking	1.000,00 / Batang	177.000,00	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Pternakan
	USULANSKPDETELAAH				3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
	76.05				3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
	KAB. MAJENE				3.27.02.1.02 - Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman
	Drs. H. ITOL SYAIFUL TONRA, MM.				3.27.02.1.02.02 -
74	MUHTAR, SP.	DTPHP - Bantuan Bibit Bawang Merah	1.600,00 / Kg	84.500,00	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Pternakan
	USULANSKPDETELAAH				3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

	76.04				3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
	KAB. POLEWALI MANDAR				3.27.02.1.02 - Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman
	IRBAD KAIMUDDIN, S.I.P				3.27.02.1.02.02 -
75	MUHTAR, SP.	DTPHP - Bantuan Bibit Bawang Merah	1.600,00 / Kg	84.500,00	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
	USULANSKPDETELAAH				3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
	76.05				3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
	KAB. MAJENE				3.27.02.1.02 - Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman
	Drs. H. ITOL SYAIFUL TONRA, MM.				3.27.02.1.02.02 -
76	MUHTAR, SP.	DTPHP - Bantuan Bibit Bawang Merah	1.600,00 / Kg	84.500,00	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
	USULANSKPDETELAAH				3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
	76.05				3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
	KAB. MAJENE				3.27.02.1.02 - Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman
	Drs. H. ITOL SYAIFUL TONRA, MM.				3.27.02.1.02.02 -
77	MUHTAR, SP.	DTPH - Bantuan Bibit Alpukat Kendil	800,00 / Batang	124.000,00	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
	USULANSKPDETELAAH				3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
	76.05				3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
	KAB. MAJENE				3.27.02.1.02 - Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman
	MEGAWATI, S.IP.				3.27.02.1.02.02 -
78	MUHTAR, SP.	DTPH - Bantuan Bibit Alpukat Kendil	800,00 / Batang	124.000,00	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
	USULANSKPDETELAAH				3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
	76.01				3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
	KAB. PASANGKAYU				3.27.02.1.02 - Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman
	Ir. H. ABIDIN ABDULLAH				3.27.02.1.02.02 -
79	MUHTAR, SP.	DTPHP - Bantuan Bibit Durian Otong	200,00 / Batang	204.000,00	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan

	USULANSKPDELAHAH				3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
	76.04				3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
	KAB. POLEWALI MANDAR				3.27.02.1.02 - Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman
	Ir. A. MUSLIM FATTAH				3.27.02.1.02.02 -
80	MUHTAR, SP.	DTPHP - Bantuan Bibit Durian Musangking	200,00 / Batang	204.000,00	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
	USULANSKPDELAHAH				3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
	76.01				3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
	KAB. PASANGKAYU				3.27.02.1.02 - Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman
	ANDI MUHAMMAD QUSYAIRY, A.Md., Tra.				3.27.02.1.02.02 -
81	MUHTAR, SP.	DTPHP - Bantuan Bibit Bawang Merah	1.600,00 / Kg	84.500,00	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
	USULANSKPDELAHAH				3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
	76.04				3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
	KAB. POLEWALI MANDAR				3.27.02.1.02 - Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman
	SYARIFUDDIN, SH.				3.27.02.1.02.02 -
82	MUHTAR, SP.	DTPHP - Bibit Jeruk Keprok	800,00 / Pohon	124.000,00	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
	USULANSKPDELAHAH				3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
	76.06				3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
	KAB. MAMUJU TENGAH				3.27.02.1.02 - Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman
	MUTHMAINNAH				3.27.02.1.02.02 -
83	MUHTAR, SP.	DTPHP - Bantuan Bibit Durian Otong	200,00 / Batang	204.000,00	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
	USULANSKPDELAHAH				3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
	76.04				3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
	KAB. POLEWALI MANDAR				3.27.02.1.02 - Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman
	Ir. A. MUSLIM FATTAH				3.27.02.1.02.02 -

84	MUHTAR, SP.	DTPHP - Bantuan Bibit Musangking Durian	1.000,00 Batang	/	204.000,00	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
	USULANSKPDELAAH					3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
	76.02					3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
	KAB. MAMUJU					3.27.02.1.02 - Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman
	SUKRI, S.Sos					3.27.02.1.02.02 -
85	MUHTAR, SP.	DTPHP - Bantuan Bibit Musangking Durian	1.000,00 Batang	/	204.000,00	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
	USULANSKPDELAAH					3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
	76.02					3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
	KAB. MAMUJU					3.27.02.1.02 - Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman
	SUKRI, S.Sos					3.27.02.1.02.02 -
86	MUHTAR, SP.	DTPHP - Bantuan Bibit Musangking Durian	2.000,00 Batang	/	204.000,00	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
	USULANSKPDELAAH					3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
	76.02					3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
	KAB. MAMUJU					3.27.02.1.02 - Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman
	SUKRI, S.Sos					3.27.02.1.02.02 -
87	MUHTAR, SP.	DTPHP - Bantuan Benih Cabai	2.000,00 / Gram		198.700.000,00	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
	USULANSKPDELAAH					3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
	76.02					3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
	KAB. MAMUJU					3.27.02.1.02 - Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman
	SUKRI, S.Sos					3.27.02.1.02.02 -
88	MUHTAR, SP.	DTPHP - Bantuan Bibit Durian Otong	200,00 / Batang		204.000,00	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
	USULANSKPDELAAH					3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
	76.04					3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
	KAB. POLEWALI MANDAR					3.27.02.1.02 - Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman

	Drs. H. HASAN BADO				3.27.02.1.02.02 -
89	MUHTAR, SP.	DTPHP - Bantuan Bibit Durian Otong	200,00 / Batang	204.000,00	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
	USULANSKPDELAAH				3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
	76.04				3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
	KAB. POLEWALI MANDAR				3.27.02.1.02 - Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman
	H. ABDUL HALIM				3.27.02.1.02.02 -
90	MUHTAR, SP.	DTPHP - Bantuan Bibit Durian Otong	200,00 / Batang	204.000,00	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
	USULANSKPDELAAH				3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
	76.04				3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
	KAB. POLEWALI MANDAR				3.27.02.1.02 - Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman
	Ir. A. MUSLIM FATTAH				3.27.02.1.02.02 -
91	MUHTAR, SP.	DTPHP - Bantuan Bibit Durian Otong	200,00 / Batang	204.000,00	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
	USULANSKPDELAAH				3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
	76.04				3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
	KAB. POLEWALI MANDAR				3.27.02.1.02 - Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman
	Drs. H. HASAN BADO				3.27.02.1.02.02 -
92	MUHTAR, SP.	DTPHP - Bantuan Bibit Durian Otong	200,00 / Batang	104.000,00	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
	USULANSKPDELAAH				3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
	76.04				3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
	KAB. POLEWALI MANDAR				3.27.02.1.02 - Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman
	Drs. H. HASAN BADO				3.27.02.1.02.02 -
93	MUHTAR, SP.	DTPHP - Bantuan Bibit Durian Musangking	1.000,00 / Batang	204.000,00	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
	USULANSKPDELAAH				3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
	76.04				3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
	KAB. POLEWALI				3.27.02.1.02 - Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih

	MANDAR				Tanaman
	H. ABDUL HALIM				3.27.02.1.02.02 -
94	MUHTAR, SP.	DTPHP - Bantuan Bibit Durian Musangking	1.000,00 / Batang	204.000,00	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
	USULANSKPDELAAH				3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
	76.04				3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
	KAB. POLEWALI MANDAR				3.27.02.1.02 - Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman
	H. ABDUL HALIM				3.27.02.1.02.02 -
95	MUHTAR, SP.	DTPHP - Bantuan Bibit Durian Otong	200,00 / Batang	104.000,00	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
	USULANSKPDELAAH				3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
	76.04				3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
	KAB. POLEWALI MANDAR				3.27.02.1.02 - Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman
	Ir. A. MUSLIM FATTAH				3.27.02.1.02.02 -
96	MUHTAR, SP.	DTPHP - Bantuan Bibit Rambutan Binjai	200,00 / Batang	80.000,00	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
	USULANSKPDELAAH				3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
	76.04				3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
	KAB. POLEWALI MANDAR				3.27.02.1.02 - Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman
	H. M. ARSAT SAGGAP, S.E.				3.27.02.1.02.02 -
97	MUHTAR, SP.	DTPHP - Bantuan Bibit Durian Musangking	200,00 / Batang	204.000,00	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
	USULANSKPDELAAH				3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
	76.04				3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
	KAB. POLEWALI MANDAR				3.27.02.1.02 - Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman
	SYAMSUL SAMAD, S.IP., M.Si.				3.27.02.1.02.02 -
98	MUHTAR, SP.	DTPHP - Bantuan Bibit Rambutan Binjai	200,00 / Batang	80.000,00	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
	USULANSKPDELAAH				3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

	76.04				3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
	KAB. POLEWALI MANDAR				3.27.02.1.02 - Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman
	SYAMSUL SAMAD, S.IP., M.Si.				3.27.02.1.02.02 -
99	MUHTAR, SP.	DTPHP - Bantuan Bibit Rambutan Binjai	200,00 / Batang	80.000,00	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
	USULANSKPDETELAAH				3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
	76.04				3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
	KAB. POLEWALI MANDAR				3.27.02.1.02 - Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman
	H. M. ARSAT SAGGAP, S.E.				3.27.02.1.02.02 -
100	MUHTAR, SP.	DTPHP - Bantuan Bibit Rambutan Binjai	200,00 / Batang	80.000,00	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
	USULANSKPDETELAAH				3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
	76.04				3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
	KAB. POLEWALI MANDAR				3.27.02.1.02 - Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman
	Drs. H. HASAN BADO				3.27.02.1.02.02 -
101	MUHTAR, SP.	DTPHP - Bantuan Bibit Manggis Puspahyang	200,00 / Batang	105.000,00	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
	USULANSKPDETELAAH				3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
	76.04				3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
	KAB. POLEWALI MANDAR				3.27.02.1.02 - Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman
	Ir. A. MUSLIM FATTAH				3.27.02.1.02.02 -
102	MUHTAR, SP.	DTPHP - Bantuan Bibit Durian Musangking	200,00 / Batang	204.000,00	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
	USULANSKPDETELAAH				3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
	76.04				3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
	KAB. POLEWALI MANDAR				3.27.02.1.02 - Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman
	H. ABDUL HALIM				3.27.02.1.02.02 -
103	MUHTAR, SP.	DTPHP - Bantuan Bibit Durian Otong	200,00 / Batang	204.000,00	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan

	USULANSKPDELAHAH				3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
	76.04				3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
	KAB. POLEWALI MANDAR				3.27.02.1.02 - Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman
	Ir. A. MUSLIM FATTAH				3.27.02.1.02.02 -
104	MUHTAR, SP.	DTPHP - Bantuan Bibit Durian Musangking	200,00 / Batang	204.000,00	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
	USULANSKPDELAHAH				3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
	76.04				3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
	KAB. POLEWALI MANDAR				3.27.02.1.02 - Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman
	Drs. H. HASAN BADO				3.27.02.1.02.02 -
105	MUHTAR, SP.	DTPHP - Bantuan Bibit Durian Otong	200,00 / Batang	204.000,00	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
	USULANSKPDELAHAH				3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
	76.04				3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
	KAB. POLEWALI MANDAR				3.27.02.1.02 - Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman
	Ir. A. MUSLIM FATTAH				3.27.02.1.02.02 -
106	MUHTAR, SP.	DTPHP - Pengembangan kawasan padi Inbrida	300,00 / Kg	6.900.000,00	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
	USULANSKPDELAHAH				3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
	76.04				3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
	KAB. POLEWALI MANDAR				3.27.02.1.02 - Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman
	Ir. A. MUSLIM FATTAH				3.27.02.1.02.03 -
107	MUHTAR, SP.	DTPHP - Bantuan Bibit Durian Musangking	200,00 / Batang	204.000,00	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
	USULANSKPDELAHAH				3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
	76.04				3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
	KAB. POLEWALI MANDAR				3.27.02.1.02 - Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman
	Drs. H. HASAN BADO				3.27.02.1.02.02 -
108	MUHTAR, SP.	DTPHP -	300,00 / Kg	17.250.000,00	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan

		Pengembangan kawasan Jagung			Peternakan
	USULANSKPDELAH				3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
	76.04				3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
	KAB. POLEWALI MANDAR				3.27.02.1.02 - Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman
	Ir. A. MUSLIM FATTAH				3.27.02.1.02.03 -
109	MUHTAR, SP.	DTPHP - Bantuan Bibit Alpukat kateki	800,00 / Batang	124.000,00	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
	USULANSKPDELAH				3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
	76.04				3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
	KAB. POLEWALI MANDAR				3.27.02.1.02 - Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman
	Drs. H. HASAN BADO				3.27.02.1.02.02 -
110	MUHTAR, SP.	DTPHP - Bantuan Bibit Rambutan Binjai	200,00 / Batang	80.000,00	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
	USULANSKPDELAH				3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
	76.04				3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
	KAB. POLEWALI MANDAR				3.27.02.1.02 - Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman
	H. M. ARSAT SAGGAP, S.E.				3.27.02.1.02.02 -
111	MUHTAR, SP.	DTPHP - Pengembangan kawasan padi Inbrida	2.000,00 / Kg	27.600.000,00	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
	USULANSKPDELAH				3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
	76.05				3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
	KAB. MAJENE				3.27.02.1.02 - Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman
	H. KALMA KATTA, S.Sos., M.M.				3.27.02.1.02.03 -
112	MUHTAR, SP.	DTPHP - Pengembangan kawasan padi Inbrida	500,00 / Kg	6.900.000,00	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
	USULANSKPDELAH				3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
	76.02				3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
	KAB. MAMUJU				3.27.02.1.02 - Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman

	H. MUHAMMAD JAYADI, S.Ag, SH.,MH				3.27.02.1.02.03 -
113	MUHTAR, SP.	DTPHP Pengembangan kawasan padi Inbrida	500,00 / Kg	6.900.000,00	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
	USULANSKPDELAH				3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
	76.06				3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
	KAB. MAMUJU TENGAH				3.27.02.1.02 - Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman
	TAUFIQ AGUS, S.H.				3.27.02.1.02.03 -
114	MUHTAR, SP.	DTPHP Pengembangan kawasan Jagung	300,00 / Kg	17.250.000,00	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
	USULANSKPDELAH				3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
	76.02				3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
	KAB. MAMUJU				3.27.02.1.02 - Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman
	SUKRI, S.Sos				3.27.02.1.02.03 -
115	MUHTAR, SP.	DTPHP Pengembangan kawasan Jagung	300,00 / Kg	17.250.000,00	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
	USULANSKPDELAH				3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
	76.02				3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
	KAB. MAMUJU				3.27.02.1.02 - Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman
	SUKRI, S.Sos				3.27.02.1.02.03 -
116	MUHTAR, SP.	DTPHP Pengembangan kawasan Jagung	300,00 / Kg	17.250.000,00	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
	USULANSKPDELAH				3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
	76.02				3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
	KAB. MAMUJU				3.27.02.1.02 - Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman
	SUKRI, S.Sos				3.27.02.1.02.03 -
117	MUHTAR, SP.	DTPH - Bantuan Bibit Alpukat Kendil	800,00 / Batang	124.000,00	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
	USULANSKPDELAH				3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
	76.04				3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN

	KAB. POLEWALI MANDAR H. ABDUL HALIM				3.27.02.1.02 - Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman 3.27.02.1.02.02 -
118	MUHTAR, SP.	DTPHP - Bantuan Bibit Durian Musangking	200,00 / Batang	204.000,00	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
	USULANSKPDETELAAH				3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
	76.02				3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
	KAB. MAMUJU				3.27.02.1.02 - Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman
	Hj. ST. SURAIDAH SUHARDI, SE., M.Si.				3.27.02.1.02.02 -
119	MUHTAR, SP.	DTPH - Bantuan Bibit Alpukat Kendil	800,00 / Batang	124.000,00	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
	USULANSKPDETELAAH				3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
	76.02				3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
	KAB. MAMUJU				3.27.02.1.02 - Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman
	Hj. ST. SURAIDAH SUHARDI, SE., M.Si.				3.27.02.1.02.02 -
120	MUHTAR, SP.	DTPHP Pengembangan kawasan Jagung	300,00 / Kg	17.250.000,00	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
	USULANSKPDETELAAH				3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
	76.02				3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
	KAB. MAMUJU				3.27.02.1.02 - Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman
	SUKRI, S.Sos				3.27.02.1.02.03 -
121	MUHTAR, SP.	DTPHP Pengembangan kawasan Jagung	300,00 / Kg	17.250.000,00	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
	USULANSKPDETELAAH				3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
	76.02				3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
	KAB. MAMUJU				3.27.02.1.02 - Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman
	SUKRI, S.Sos				3.27.02.1.02.03 -
122	MUHTAR, SP.	DTPHP Pengembangan	300,00 / Kg	17.250.000,00	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan

	USULANSKPDELAH	kawasan Jagung			3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
	76.02				3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
	KAB. MAMUJU				3.27.02.1.02 - Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman
	SUKRI, S.Sos				3.27.02.1.02.03 -
123	MUHTAR, SP.	DTPHP - Gerakan Tanam/Panen Padi/Jagung	300,00 / Kg	17.250.000,00	3.27.00.0.00.01.0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
	USULANSKPDELAH				3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
	76.06				3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
	KAB. MAMUJU TENGAH				3.27.02.1.02 - Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman
	Hj. AMALIA FITRI, SE., MM.				3.27.02.1.02.02 -
124	MUHTAR, SP.	DTPHP - Bimtek/pelatihan Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Koorporasi	2,00 / Kelompok	150.000.000,00	3.27.00.0.00.01.0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
	USULANSKPDELAH				3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
	76.04				3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
	KAB. POLEWALI MANDAR				3.27.07.1.02 - Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian
	Usman Suhuriah				3.27.07.1.02.02 -
125	MUHTAR, SP.	DTPHP - Pelatihan pembuatan pakan ternak	3,00 / Kelompok	50.000.000,00	3.27.00.0.00.01.0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
	USULANSKPDELAH				3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
	76.04				3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
	KAB. POLEWALI MANDAR				3.27.02.1.04 - Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi
	Usman Suhuriah				3.27.02.1.04.01 -
126	MUHTAR, SP.	DTPHP - Pelatihan pembuatan pakan ternak	3,00 / Kelompok	50.000.000,00	3.27.00.0.00.01.0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
	USULANSKPDELAH				3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
	76.04				3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
	KAB. POLEWALI MANDAR				3.27.02.1.04 - Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi

	Usman Suhuriah				3.27.02.1.04.01 -
127	MUHTAR, SP.	DTPHP - Pelatihan pembuatan Pakan Ternak Fermentasi	3,00 / Kelompok	50.000.000,00	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
	USULANSKPDELAH				3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
	76.04				3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
	KAB. POLEWALI MANDAR				3.27.02.1.04 - Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi
	Usman Suhuriah				3.27.02.1.04.01 -
128	MUHTAR, SP.	DTPHP - Pelatihan Budidaya ternak	3,00 / Kelompok	50.000.000,00	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
	USULANSKPDELAH				3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
	76.04				3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
	KAB. POLEWALI MANDAR				3.27.02.1.04 - Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi
	Usman Suhuriah				3.27.02.1.04.01 -
129	MUHTAR, SP.	DTPHP - Pelatihan pembuatan Pakan Ternak Fermentasi	3,00 / Kelompok	150.000.000,00	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
	USULANSKPDELAH				3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
	76.04				3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
	KAB. POLEWALI MANDAR				3.27.02.1.04 - Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi
	Usman Suhuriah				3.27.02.1.04.01 -

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN KEGIATAN TAHUN 2024

III.1 Penelaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Agenda pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 adalah “*Indonesia Berpenghasilan Menengah - Tinggi, yang Sejahtera, Adil dan Berkesinambungan*”. Agenda pembangunan tersebut dijabarkan menjadi Tujuh Agenda Pembangunan, dimana bidang pertanian merupakan agenda pertama yakni Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas. Agenda tersebut berfokus pada Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi yang merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui: 1) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kelautan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan 2) Akselerasi peningkatan nilai tambah agro fishery industry, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

Memerhatikan arah Kebijakan Nasional dalam RPJMN 2020-2024 dan arahan Presiden, kebijakan pertanian dalam periode ini diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi termasuk memerhatikan kesejahteraan keluarga petani dan memerhatikan keberlanjutan sumber daya pertanian. Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan maka Kementerian Pertanian menetapkan 5 (lima) arah kebijakan sebagai berikut :

- a. Terjaganya ketahanan pangan nasional
- b. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian
- c. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Pertanian (SDM) dan
- d. Terwujudnya reformasi birokrasi dan tata Kelola pemerintah yang berorientasi pada layanan prima

Sasaran strategis Kementerian Pertanian Tahun 2020 – 2024 adalah

- a. Meningkatnya ketersediaan pangan strategis dalam negeri
- b. Meningkatnya daya saing komoditas pertanian nasional
- c. Terjaminnya keamanan dan mutu pangan strategis nasional
- d. Termanfaatkannya inovasi dan teknologi pertanian
- e. Tersedianya prasarana dan sarana pertanian yang sesuai kebutuhan
- f. Terkendalinya penyebaran organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI) pada tanaman serta penyakit pada hewan

- g. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian Nasional
- h. Terselenggaranya birokrasi Kementerian Pertanian yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima.

Sumber: Renstra Kementerian Pertanian Republik Indonesia Tahun 2020 – 2024

III.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Selaras dengan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023 – 2026 serta sesuai dengan Perencanaan Strategis yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Tanaman

Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026, maka Tujuan Rencana Kerja Pembangunan Pertanian Provinsi Sulawesi Barat yaitu Meningkatkan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, Meningkatkan PDRB Sektor Unggulan Daerah dan Meningkatkan pendapatan petani.

Adapun Sasaran Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan sebagai berikut :

1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah
2. Meningkatnya kontribusi sub sektor Pertanian terhadap PDRB
3. Meningkatnya Produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura serta produksi dan populasi peternakan berbasis kawasan
4. Meningkatnya Kapasitas Penyuluh Pertanian dan Kelembagaan Petani berbasis kawasan

Indikator dan Target Sasaran Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel III.2 Indikator dan target sasaran Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA
			2024
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP Lingkup OPD	Poin	66,5
Meningkatnya Produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura serta produksi dan populasi peternakan berbasis kawasan	A. Tanaman Pangan		
	Padi	Ton/Ha	5,66
	Jagung	Ton/Ha	5,71
	Kedelai	Ton/Ha	1,8
	B. Hortikultura		
	Cabai Rawit	Ton/Ha	0,88
	Cabai Besar	Ton/Ha	0,45
	Bawang Merah	Ton/Ha	1,86
	Pisang	Ton/Ha	94,56
	Durian	Ton/Ha	16,25

	Jeruk	Ton/Ha	0,40
	Nenas	Ton/Ha	0,21
	Rambutan	Ton/Ha	8,59
	C. Populasi Ternak		
	Sapi	Ekor	120.817
	Kerbau	Ekor	10.037
	Kambing	Ekor	204.345
	Kuda	Ekor	1.490
	Babi	Ekor	180.053
	Unggas	Ekor	9.033.127
Meningkatnya Kapasitas Penyuluh Pertanian dan Kelembagaan Petani berbasis kawasan	Jumlah penyuluh yang berperan aktif mengawal program Pengembangan kawasan tanaman pangan, hortikultura dan Peternakan	orang	810
	Jumlah Lembaga petani yang maju dan mandiri	Kelompok	673

III. 3. Program dan Kegiatan

Program pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Barat dirumuskan secara komprehensif dan berdasarkan urusan Kewenangan (Undang undang 23 tahun 2014) untuk dapat dilaksanakan oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah. Program dan kegiatan pembangunan berdasarkan Permendagri-90 Tahun 2019 dan Kepmendagri Nomor 900.1.15.1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 5889 Tahun 2021 tentang Hail Verifikasi, validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023 terdiri dari 7 (Tujuh) Program, 19 (Sembilan Belas) kegiatan dan 50 (Lima Puluh) sub kegiatan, yang dipaparkan lebih rinci sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, dilaksanakan melalui Kegiatan :
 - ✚ Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan :
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

✚ Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD
- Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

✚ Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

✚ Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Penyediaan Bahan/Material
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

✚ Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pengadaan Mebel

✚ Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

✚ Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian, dilaksanakan melalui Kegiatan :

✚ Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian

Sub Kegiatan :

- Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian

✚ Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman

Sub Kegiatan :

- Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih
- Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan.

✚ Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi

Sub Kegiatan :

- Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi
- Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi
- Pengembangan Kapasitas Petugas Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan, Paramedik Veteriner, dan Medik Veteriner

✚ Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain

Sub Kegiatan :

- Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
- Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain

3. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian, dilaksanakan melalui Kegiatan :

✚ Penataan Prasarana Pertanian

Sub Kegiatan :

- Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian
- Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya

4. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, dilaksanakan melalui Kegiatan :

✚ Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

Sub Kegiatan :

- Penanggulangan Daerah Terdampak wabah penyakit Hewan menular
- ✚ Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan

Sub Kegiatan :

- Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

✚ Kesejahteraan Hewan

Sub Kegiatan :

- Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Kesejahteraan Hewan dan Nomor Kontrol Veteriner (NKV)

5. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian, dilaksanakan melalui Kegiatan :

✚ Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi

Sub Kegiatan :

- Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
- Penanganan dampak perubahan iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

6. Program Perizinan Usaha Pertanian

✚ Penerbitan Izin Usaha Pertanian Yang Kegiatan Usahanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- Penyusunan standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha
-

Pertanian

- Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kab/Kota

7. Program Penyuluhan Pertanian, dilaksanakan melalui Kegiatan :

✚ Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian

Sub Kegiatan :

- Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani

✚ Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan

Sub Kegiatan :

- Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koperasi Petani
-

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

IV.1 Program dan Kegiatan Prioritas Perangkat Daerah

Dalam mewujudkan pembangunan pertanian dan peternakan yang lebih fokus dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat maka terdapat beberapa kegiatan prioritas untuk tahun 2024 antara lain :

1. Peningkatan produksi dan produktivitas Tanaman pangan melalui Demfarm Intensifikasi padi Inbrida IP.300
2. Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman hortikultura melalui Demfarm intensifikasi bawang merah, pengembangan Kawasan aneka cabai dan aneka sayuran lainnya
3. Pengembangan Kawasan buah – buahan
4. Pengembangan perbenihan tanaman pangan terkhusus padi untuk memenuhi kebutuhan benih petani di Sulawesi barat
5. Perbanyak benih/bibit tanaman buah tahunan seperti durian, lengkeng, rambutan, jambu kristal
6. Perbanyak benih padi nutrizink untuk penanganan stunting
7. Pengembangan ternak dan HMT Unggul
8. Pengendalian hama terpadu dan OPT melalui SLPHT
9. Penerapan Penanganan Dampak Perubahan Iklim (PPDPI) melalui adaptasi teknologi ramah lingkungan sesuai kondisi wilayah masing masing
10. Pelatihan dan peningkatan kapasitas penyuluh dan petani
11. Pengawasan benih/bibit unggul tanaman pangan dan hortikultura
12. Peningkatan populasi ternak dan pencegahan/penanggulangan penyakit hewan ternak
13. Fasilitasi izin usaha pertanian

IV.2 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Program dan kegiatan perangkat daerah berfokus pada sektor tanaman pangan, hortikultura dan peternakan untuk meningkatkan pendapatan petani. Penetapan program kegiatan perangkat daerah didasari pada perencanaan partisipatif dengan melibatkan semua pihak berkepentingan melalui forum OPD atau musyawarah pembangunan pertanian bersama OPD bidang pertanian dan peternakan kabupaten se Sulawesi Barat. Program dan kegiatan pula berdasarkan perencanaan dari atas (Top – down) misalnya program kementerian pertanian RI melalui dana Dekonsentrasi serta Tugas Pembantuan. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas TPHP Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Kode	URUSAN	KINERJA URUSAN			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
					Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan								15.813.054.647,53			
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					49.786.757.814,00				15.813.054.647,53		
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					49.786.757.814,00				15.813.054.647,53		
3	271				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					19.454.888.225,00				56.605.220,00		
3	271	01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					304.170.340,00				0,00		
3	271	01	001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
					-	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tercapainya Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	4 Dokumen	70 Persen	164.144.940,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	0,00
3	271	01	001		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD											
					-	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tercapainya Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	70 Persen	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	0,00
3	271	01	001		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD											

						-	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tercapainya Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	12 Dokumen	95 Persen	20.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	0,00				
3	2	0	1	0			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD															
	7	1	.	0			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Tercapainya Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	12 Dokumen	95 Persen	20.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	0,00				
				2	4																	
3	2	0	1	0			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD															
	7	1	.	0			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tercapainya Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Laporan	95 Persen	20.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	0,00				
				2	5																	
3	2	0	1	0			Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan															
	7	1	.	0																		
				2	6																	

						-	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Tercapainya Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	95 Persen	12.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	0,00				
3	27	01	1002	007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																	
						-	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tercapainya Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	12 Laporan	95 Persen	11.537.120,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 Laporan	0,00				
3	27	01	1002	008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																	
						-	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tercapainya Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	95 Persen	6.605.220,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	6.605.220,00				
3	27	01	1005		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah													100.000.000,00				0,00
3	27	01	1000		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																	

						-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	5 Paket	-	41.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	0,00
3	2	0	1	0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
	7	1	.	0		-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Paket	-	80.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	0,00
			6	0														
			0	0														
			6	5	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan													
						-	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	-	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	4 Paket	-	45.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	4 Paket	0,00
3	2	0	1	0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan													
	7	1	.	0		-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	4 Dokumen	-	15.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	0,00
			6	6														

3	2	0	1	0	Penyediaan Bahan/Material														
	7	1	.	0		-	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	26 Paket	-	76.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	26 Paket	0,00	
3	2	0	1	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
	7	1	.	0		-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Laporan	-	200.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	0,00	
3	2	0	1		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										57.000.000,00				50.000.000,00
	7	1	.	0															
3	2	0	1	0	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
	7	1	.	0		-	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	5 Unit	-	32.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit	50.000.000,00	
				7															
3	2	0	1	0	Pengadaan Mebel														
	7	1	.	0		-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Paket	-	25.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	0,00	
				7															

						Persentase Ketersediaan Sarana Pertanian terhadap Lahan Pertanian	Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Persentase Ketersediaan Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Unggul	Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	78 Persen	2.00 Dokumen	60 Persen	250.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	2.00 Dokumen	947.730.889,72
3	2	0	1	0		Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi												
						Persentase Ketersediaan Sarana Pertanian terhadap Lahan Pertanian	Jumlah pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Persentase Ketersediaan Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Unggul	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	78 Persen	6 laporan	60 Persen	898.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	6 laporan	1.579.551.482,87
3	2	0	1	0		Pengembangan Kapasitas Petugas Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan, Paramedik Veteriner, dan Medik Veteriner												

						Persentase Ketersediaan Sarana Pertanian terhadap Lahan Pertanian	Jumlah Petugas Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan, Paramedik Veteriner, dan Medik Veteriner yang mengikuti pengembangan kapasitas	Persentase Ketersediaan Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Unggul	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	78 Persen	12 Orang	60 Persen	1.200.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Petugas Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan, Paramedik Veteriner, dan Medik Veteriner yang mengikuti pengembangan kapasitas	12 Orang	75.191.872,24	
3	27	02	107			Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain							163.443.000,00					7.549.927.135,81	
3	27	02	107	002		Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain													
						Persentase Ketersediaan Sarana Pertanian terhadap Lahan Pertanian	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah Hijauan Pakan Ternak Dari Luar Provinsi Jumlah Penyediaan Bibit Ternak Dari Luar Provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	78 Persen	605 Ton	90 Hektar 70 Ekor	61.880.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	605 Ton	3.564.873.093,19	
3	27	02	107	003		Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain													
						Persentase Ketersediaan Sarana Pertanian terhadap Lahan Pertanian	Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain	Jumlah Hijauan Pakan Ternak Dari Luar Provinsi Jumlah Penyediaan Bibit Ternak Dari Luar	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	78 Persen	1000 Dosis	90 Hektar 70 Ekor	101.563.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain	1000 Dosis	3.985.054.042,62	

						Penyakit Hewan Menular											
3	2	0	1		Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan							1.205.000.000,00					0,00
3	2	0	1	0	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner												
				0		Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular Persentase Unit Usaha Produk Hewan yang Menerapkan Persyaratan Teknis Kesehatan dan Keamanan Produk Hewan Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Daerah Yang Menerapkan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	78 Persen 78 Persen 6.00 Persen	3 Dokumen	100 Persen	1.205.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	3 Dokumen	0,00

						Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	Persentase Bencana Pertanian Yang Tertanggulangi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	78 Persen	450 Ha	100 Persen	151.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	450 Ha	166.978.502,00					
3	2	0				PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN													225.000.000,00				0,00
3	2	0	1			Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota													225.000.000,00				0,00
3	2	0	1	0		Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian																	
						-	Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	-	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	1 Dokumen	0,00					
3	2	0	1	0		Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota																	
						-	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/ Kota	-	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	175.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten /Kota	1 Dokumen	0,00					
3	2	0				PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN													8.455.662.000,00				2.645.031.799,00
3	2	0	1			Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian													5.671.000.000,00				2.494.156.043,00

			2																	
3	2	0	1	0	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani															
	7	7	.	0																
			2	2																
						Persentas e Kelembag aan Petani yang Menerapk an GAP dan GHP Persentas e Layanan Penyuluha n Pertanian pada Kawasan Pertanian berbasis Koorporasi dan Kawasan Pertanian Strategis	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberday aan	Cakupan Layanan Penyuluh Pertanian Yang Profesional	Semua Kota/Kab, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	78 Persen 78 Persen	40 Kelompok	100 Persen	5.671.000.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluha n dan Pemberda yaan	40 Kelompok	2.494.156.043,00		
3	2	0	1		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan											2.784.662.000,00				150.875.756,00
	7	7	.	0																
			3																	
3	2	0	1	0	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani															
	7	7	.	0																
			3	6																
						Persentas e Kelembag aan Petani yang Menerapk an GAP dan GHP Persentas e Layanan Penyuluha n Pertanian pada Kawasan Pertanian	Jumlah korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi	Persentase Kelembaga an Ekonomi Petani Yang Terkelola Baik Pada Kawasan Pertanian Berbasis Koorporasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	78 Persen 78 Persen	1 Unit	100 Persen	2.784.662.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Jumlah korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi	1 Unit	150.875.756,00		

**DUKUNGAN PENGANGGARAN DEKONSETRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN APBN
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN TAHUN 2024**

NO	SATKER	BIDANG	PROGRAM	PAGU
1	340056	Hortikultura	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	73.900.000
			Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	1.044.000.000
			Program Dukungan Manajemen	432.400.000
2	340142	Hortikultura	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	451.000.000
			Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	2.155.000.000
			Program Dukungan Manajemen	180.000.000
3	340070	Tanaman Pangan	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	2.707.910.000
			Program Dukungan Manajemen	58.900.000
4	340141	Tanaman Pangan	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	1.882.385.000
			Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	3.635.225.000
			Program Dukungan Manajemen	478.978.000
5	340143	Peternakan dan Kesehatan Hewan	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	120.000.000
			Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	4.169.870.000
			Program Dukungan Manajemen	271.479.000
6	340146	Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP)	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	10.589.190.000
			Program Dukungan Manajemen	323.220.000
7	345105	Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	3.323.414.000

B A B V P E N U T U P

Sebagai bagian penutup dari Rencana Kerja Tahun 2024 ini, bahwa Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat secara umum telah berusaha melakukan perencanaan yang sejalan dengan Tujuan dan Sasaran Pemerintah Sulawesi Barat yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah 2023 – 2026.

Proses perencanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Tanaman Pangan Provinsi Sulawesi Barat menerapkan mekanisme perencanaan *bottom up planning* dan *top down policy*. Oleh karena itu kegiatan yang terdapat di dalam Renja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Tahun 2024 merupakan usulan kegiatan dan dialokasikan ke semua Kabupaten sesuai usulan dalam musrenbang, forum OPD dan melalui usulan pokok pokok pikiran DPRD di Provinsi Sulawesi Barat yang diselaraskan dengan kebijakan daerah dan kemampuan fiskal daerah.

Untuk dapat lebih meningkatkan kinerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat di tahun mendatang, peran serta maksimal dari seluruh potensi dan stakeholder Dinas mutlak diperlukan, sehingga peran dan tanggung jawab pelaku pembangunan dapat terakomodir.

Harapannya rencana kerja ini dapat mendorong peningkatan pelayanan publik yang dilakukan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat yang pada akhirnya berdampak kepada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani.

Kepala Dinas

Muhtar, SP

Pangkat: Pembina Utama Muda/IV.c

NIP : 19641231 198711 1 036
